



Tahun 2024

Laporan Kinerja BBRSEKP



**Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan**

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

2024



Tahun 2024

Laporan Kinerja BBRSEKP



**Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan**

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

2024

TIM PENYUSUN

Pembina

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

(Dr. A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, M.T)

Penanggung Jawab

Ketua Kelompok Pengelolaan Kinerja

(Fenni Eddrisea, M.Si)

Anggota

Nurma Yunita D, S.E

Andakoro Yoga P, S.I.Kom

Kontributor

Kepala Sub Bagian Umum

Kelompok Kerja Perencanaan

Kelompok Kerja Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

Kelompok Kerja Penyelenggaran Sistem Manajemen SDMA

Kelompok Kerja Public Sharing Sosial Ekonomi KP

Kelompok Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kelompok Kerja Online Journal Publishing Sosial Ekonomi KP

Kelompok Kerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmat-NYA sehingga Laporan Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan perwujudan tanggung jawab atas kinerja dan pencapaian visi dan misi BBRSEKP selama periode tahun 2024, dengan metode penyajian mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Laporan Kinerja BBRSEKP tahun 2024 mempunyai beberapa fungsi antara lain memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian selama periode tahun 2024 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BBRSEKP dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Kinerja BBRSEKP diukur atas dasar penilaian indikator Kinerja (IK) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan (SK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) BBRSEKP tahun 2024 yang merupakan kontrak kinerja tahunan.

Selanjutnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja pelaksanaan tugas serta bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai BBRSEKP dalam meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Akhirnya, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kontribusi semua pihak yang mendukung pencapaian kinerja BBRSEKP selama tahun 2024. Semoga laporan kinerja ini juga memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Jakarta, 18 Januari 2025

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dr. A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, M.T

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tim Reviewer



Dewi Rukmasari

Jakarta, 7 Maret 2025
Perwakilan Satker Yang di Reviu
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP

1. Fenni Eddrisea



2. Nurma Yunita

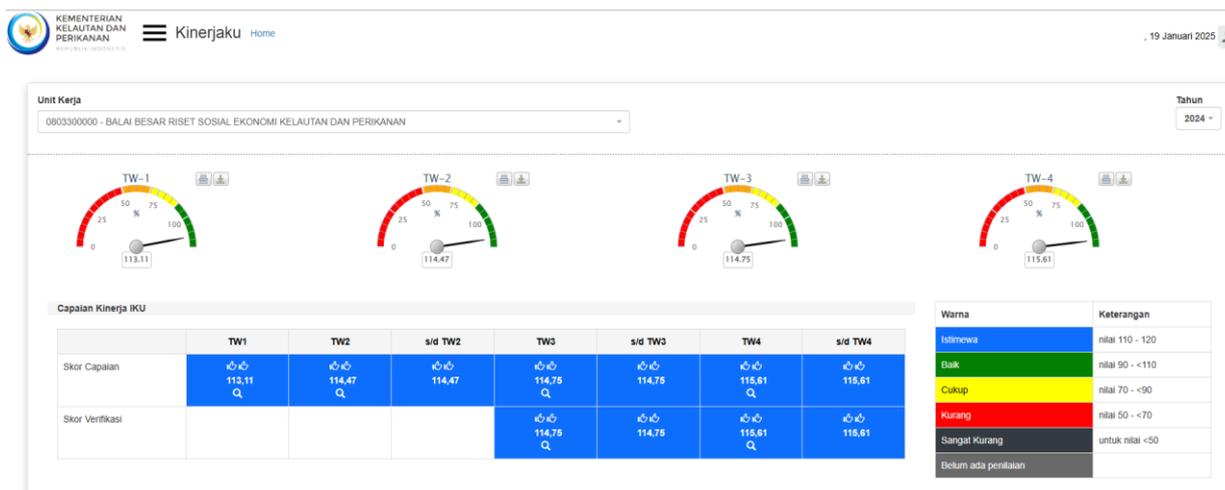


RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan gambaran capaian kinerja BBRSEKP sepanjang tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi informasi atas kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi utama, mengelola keuangan, dan implementasikan SAKIP di lingkungan BBRSEKP pada tahun 2024.

Pada tahun 2024, BBRSEKP telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) yang akan dicapai pada akhir tahun dengan dukungan anggaran Rp.12.235.000.000 guna mencapai target - target yang telah ditetapkan pada 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja (IK). Hasil pengukuran kinerja dari aplikasi kinerjaku.kkp.go.id diperoleh data capaian kinerja BBRSEKP pada tahun 2024 sebesar **115,61 %** sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:

Gambar 1. Capaian Kinerja pada Dashboard Kinerjaku BBRSEKP Tahun 2024



Selama tahun 2024 dari 20 IK BBRSEKP, terdapat 11 IK berstatus istimewa (biru), dan terdapat 9 IK berstatus baik (hijau). Rincian target dan realisasi 20 IK tersebut adalah:

1. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria BBRSEKP (NSPK) dengan target sebesar 3 NSPK dengan capaian sebesar 4 NSPK atau sama dengan 120%;
2. Indeks Profesional ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks) dengan target indeks 76 dan capaian indeks sebesar 89,46 atau sama dengan 117,71%;
3. Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP(%) dengan target sebesar 85% dan capaian sebesar 97,40% atau sama dengan 114,59%;

4. Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%) dengan target sebesar 100% dan capaian sebesar 121% atau sama dengan 120%;
5. Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP(%) dengan target sebesar 90,50 dan capaian sebesar 123,50% atau sama dengan 120%;
6. Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket) dengan target sebanyak 3 paket dan capaian sebanyak 3 paket kerjasama atau sama dengan 100%;
7. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%) dengan target sebesar 94,00% dan capaian sebesar 133,33% atau sama dengan 120%;
8. Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP (Inovasi) dengan target sebanyak 1 inovasi dan capaian sebanyak 1 inovasi atau sama dengan 100%;
9. Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai) dengan target senilai 86,50 dan capaian senilai 92,00 atau sama dengan 106,36%;
10. Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai) dengan target senilai 93,76 dan capaian senilai 99,29 atau sama dengan 105,90%;
11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai) dengan target senilai 71 dan capaian senilai 100 atau sama dengan 120%;
12. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai) dengan target senilai 94 dan capaian senilai 98,53 atau sama dengan 104,82%;
13. Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai) dengan target senilai 81 dan capaian senilai 83,65 atau sama dengan 103,27%;
14. Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%) dengan target sebesar 98% dan capaian sebesar 99,86% atau sama dengan 101,90%;
15. Batas Tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BBRSEKP (%) dengan target sebesar 0,50% dan capaian sebesar 0,10% atau sama dengan 120%;
16. Jumlah Sosial Ekonomi yang Ter-reakreditasi (Indeks Jumlah) dengan target sebanyak 1 indeks dan capaian sebesar 1 indeks jurnal atau sama dengan 100%;
17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) dengan target sebesar 82% dan capaian sebesar 100% atau sama dengan 120%;
18. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai) dengan target senilai 85 dan capaian senilai 95,40 atau sama dengan 120%;
19. Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%) dengan target sebesar 77,80% dan capaian sebesar 100% atau sama dengan 120%;
20. Layanan Perkantoran BBRSEKP (%) dengan target sebesar 100% dan capaian sebesar 100% atau sama dengan 100%.

Secara umum, pencapaian kinerja BBRSEKP adalah istimewa. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yang dapat tercapai semuanya, bahkan beberapa melebihi target yang ditetapkan serta realisasi anggaran yang tinggi.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran BBRSEKP selama tahun 2024 sebesar Rp.10.987.246.299 dari pagu anggaran Rp. 11.002.200.000. Dengan demikian, pencapaian kinerja output BBRSEKP dapat tercapai dengan dukungan anggaran sebesar 99,86% dari pagu.

Jika dilihat berdasarkan Sasaran Kegiatan (SK), maka dari dua SK tercapai melebihi target atau **“ISTIMEWA”**, yaitu baik SK “Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan BBRSEKP” dengan persentase capaian 120% dan “Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker” dengan persentase capaian 111,21%.

Guna mewujudkan peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)**

Dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintah dan badan publik membutuhkan reformasi sistem dan pola kerja utama dengan menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau *e-government*. Pelaksanaan *e-government* terkait keterbukaan informasi dilakukan dengan sistem *one data policy* atau kebijakan satu data agar dapat diakses oleh sistem kementerian dan lembaga sehingga dibutuhkan indikator keterbukaan informasi.

2. **Verifikasi Capaian Kinerja**

Dalam rangka akuntabilitas atas capaian IK, kegiatan verifikasi perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuai bukti dukung yang ada. Disamping itu, verifikasi penting dilaksanakan agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat dilakukan secara disiplin dan tepat waktu.

Capaian kinerja diharapkan lebih baik dari tahun sebelumnya, atau target berikutnya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan data dukung juga perlu ditingkatkan melalui mekanisme penyampaian data capaian sekaligus dilengkapi dengan bukti data dukung capaian.

Akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh pegawai maupun stakeholders BBRSEKP. Akhirnya, BBRSEKP berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja BBRSEKP Tahun. 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2024	Capaian 2024	% Capaian
1	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan BBRSEKP	1	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria BBRSEKP (NSPK)	3	4	120
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	2	Indeks Profesional ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks)	76	89,46	117,71
		3	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%)	85	97,40	114,59
		4	Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%)	100	121	120
		5	Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%)	90,50	123,50	120
		6	Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket)	3	3	100
		7	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%)	94,00	133,33	120
		8	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP (Inovasi)	1	1	100
		9	Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai)	86,50	92,00	106,36
		10	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	93,76	99,29	105,90
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	71	100	120
		12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai)	94	98,53	104,82
		13	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	81	83,65	103,27
		14	Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)	98,00	99,86	101,90
		15	Batas Tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BBRSEKP (%)	≤0,5	0,10	120
		16	Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-akreditasi (Indeks Jurnal)	1	1	100
		17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	82	100	120
		18	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai)	85	95,40	112,24
		19	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%)	77,80	100	120
		20	Layanan Perkantoran BBRSEKP (%)	100	100	100

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan Eksekutif	v
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	4
1.3. Tugas dan Fungsi	4
1.4. Keragaan SDM	6
1.5. Potensi dan Permasalahan	9
1.6. Sistematika Laporan	9
Bab II Perencanaan Kinerja	12
2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Rencana Kerja Tahunan	18
2.3 Perjanjian Kinerja	19
2.4 Pengukuran Kinerja	21
Bab III Akuntabilitas Kinerja	23
3.1. Capaian Kinerja BBRSEKP Tahun 2024	23
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	24
3.3. Realisasi Keuangan	69
3.4. Analisis Efisiensi Anggaran	73
Bab IV Penutup	78
4.1 Kesimpulan	78
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	82
Lampiran	
- Perjanjian Kinerja	
- Penghargaan BBRSEKP	

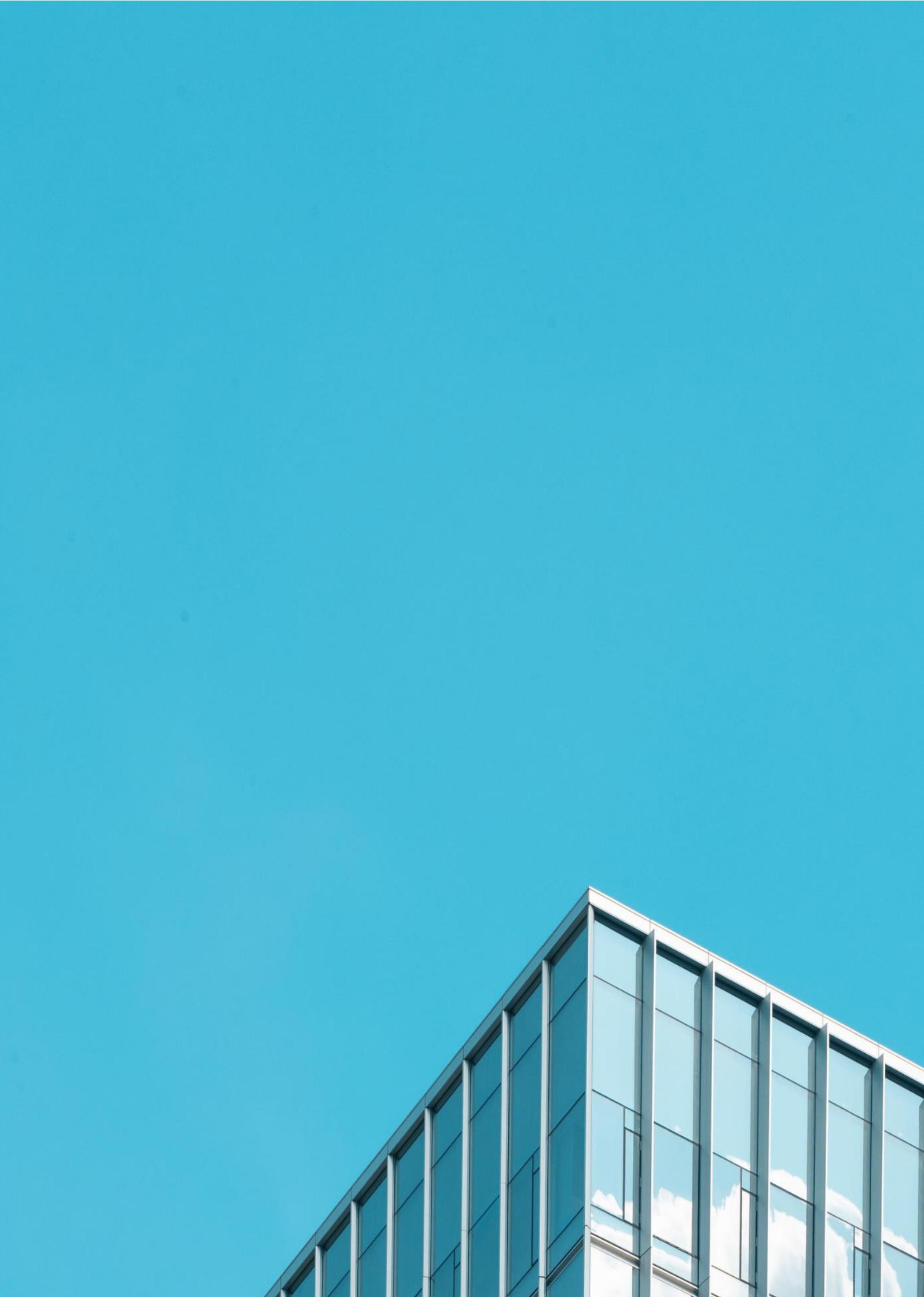
Daftar Tabel

1	Capaian Indikator Kinerja BBRSEKP Triwulan Tahun. 2024	viii
2	Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan dalam Renstra BBRSEKP 2020-2024	15
3	Rencana Kerja BBRSEKP Tahun 2024	18
4	Perjanjian Kerja BBRSEKP Tahun 2024	20
5	Capaian Kerja BBRSEKP Tahun 2024	24
6	Capaian IK Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria BBRSEKP (NSPK)	26
7	Perbandingan Capaian IK 1 Dengan satker BRPH - KLHK	26
8	Penyesuaian Bobot Kualifikasi IP ASN	28
9	Penyesuaian Bobot Kompetensi IP ASN	29
10	Penyesuaian Bobot Kinerja IP ASN	29
11	Penyesuaian Bobot Disiplin IP ASN	29
12	Capaian IK Indeks Profesional ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks)	29
13	Perbandingan Capaian IK 2 Dengan K/L Pusdiklat TA Kemenag	30
14	Capaian IK Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%)	32
15	Perbandingan capaian IK 3 dengan satker BBPPL - Kementan	32
16	Capaian IK Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan	34
17	Capaian IK Persentase Efektifitas penyebaran informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%)	35
18	Capaian IK Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket)	37
19	Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP	38
20	Perbandingan Capaian Kerjasama BBRSEKP dengan Pusluh KP	39
21	Perubahan Pengukuran Indikator MP	41
22	Capaian IK 7 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP	41
23	Perbandingan Capaian IK 7 dengan Satker BBRP2BKP	42
24	Capaian IK 8 Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja BBRSEKP	43
25	Capaian IK 9 Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP	45
26	Perbandingan Capaian IK 8 Dengan Satker Pusdiklat TA - Kemenag	46
27	Capaian IK 10 Nilai IKPA BBRSEKP	48
28	Perbandingan Capaian IK 10 dengan K/L DKPKP DKI Jakarta	48
29	Capaian IK 11 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	50
30	Perbandingan IK 11 dengan satker BBRP2BKP	51
31	Capaian IK 12 Nilai Rekonsiliasi Kinerja BBRSEKP	52
32	Perbandingan Capaian IK 12 dengan satker BBRP2BKP	53
33	Capaian IK 13 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP	54
34	Perbandingan Capaian IK 13 dengan Satker K/L Pusluh - KLHK	55
35	Capaian IK 14 Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP	56
36	Capaian IK 15 Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK-RI atas LK BBRSEKP	58
37	Perbandingan Capaian IK 16 dengan BBRP2BKP	59
38	Capaian IK 16 Jurnal Sosial Ekonomi Ter-reakreditasi	60
39	Perbandingan Capaian IK 16 dengan K/L Universitas Halu Oleo	61
40	Capaian IK 17 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP	62
41	Perbandingan Capaian IK 17 dengan K/L Pusdiklat TA - Kemenag	63
42	Capaian IK 18 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi	64
43	Perbandingan Capaian IK 18 dengan K/L PA Datarab Hunipopu - MA	65
44	Capaian IK 19 Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	66

45	Capaian IK 20 Persentase Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	68
46	Perbandingan Capaian IK 20 dengan BBRP2BKP	69
47	Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Tahun 2024	70
48	Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran Persasaran Tahun 2024	70
49	Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran Per IK Tahun 2024	70
50	Capaian Efisiensi Anggaran BBRSEKP Tahun 2024	75
51	Rincian Realisasi Atas 20 IK BBRSEKP Tahun 2024	80

Daftar Gambar

1	Capaian Kinerja pada Dashboard Kinerja BBRSEKP Tahun 2024	V
2	Struktur Organisasi BBRSEKP	5
3	Rincian PNS BBRSEKP	6
4	Komposisi Pegawai BBRSEKP	6
5	Peta Strategis Kegiatan BBRSEKP 2024	16
6	Dashboard Kinerja BBRSEKP Tahun 2024	23
7	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 1	28
8	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 2	31
9	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 3	33
10	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 4	35
11	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 5	37
12	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 6	39
13	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 7	42
14	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 8	43
15	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 9	45
16	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 10	47
17	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 11	49
18	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 12	51
19	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 13	53
20	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 14	55
21	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 15	57
22	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 16	59
23	Data Rekapitulasi Capaian IKU 16 sesuai surat BPPSDMKP	60
24	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 17	61
25	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 18	63
26	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 19	65
27	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 20	67
21	Sebaran Realisasi BBRSEKP berdasarkan Variabel Pelaksanaan, Realisasi dan Pemanfaatan	70



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan

1.3 Tugas Dan Fungsi

1.4 Keragaan SDM

1.5 Potensi dan Permasalahan

1.6 Sistematika Laporan Kinerja



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) merupakan salah satu unit kerja eselon II pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab kepada Badan Penyuluhan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). BBRSEKP menurut PERMEN KP No.72/PERMEN-KP/2020, menjadi unit kerja yang memiliki tugas dalam melaksanakan penelitian di bidang sosial ekonomi, budaya, dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab kepada lingkup Eselon I yaitu BPPSDM KP, maka BBRSEKP memiliki suatu kewajiban dalam melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan hal diatas, maka kewajiban tersebut dilaksanakan dengan dasar Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan disebutkan bahwa setiap unit kerja diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir tahun kepada Menteri K/L melalui Sekretariat Jenderal pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

Bentuk implementasi tugas dan fungsi BBRSEKP melalui pelaksanaan kegiatan penelitian dan didukung operasional kegiatan manajerial serta sarana dan prasarana. Ketiga Kegiatan tersebut menjadi komponen rencana kegiatan satker yang memiliki target output atau keluaran pada setiap tahunnya. Output yang dihasilkan merupakan indikator keberhasilan dari BBRSEKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan perencanaan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu instansi dan penyelenggara negara di lingkup Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BBRSEKP telah menetapkan rencana kerja tahun 2024, melakukan monitoring dan evaluasi, pengukuran kinerja yang telah dicapai, serta penyusunan LKj BBRSEKP Tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang diemban BBRSEKP.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja TA. 2024, berupa output dukungan manajemen satker. Target output tertuang dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) BBRSEKP dan secara detail tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) BBRSEKP dengan alokasi anggaran Rp. 12.235.000.000,- dengan DIPA Petikan Satker Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (403836) Nomor : SP DIPA - 032.12.2.403836/2024 tanggal 5 November 2024 dengan kode digital stamp DS:9102-1711-8131-1267 (Revisi 10).

Gambaran akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 serta keluaran atau output apa saja yang telah dihasilkan BBRSEKP dituangkan dalam laporan kinerja ini. Meskipun laporan kinerja tahun 2024 lebih banyak menginformasikan kegiatan manajerial, berkenaan dengan masih belum ditetapkannya organisasi baru pasca tugas riset yang disatukan kedalam BRIN, namun tetap disusun sesuai kaidah aturan yang berlaku untuk dapat diketahui dan menjadi informasi bagi stakeholder terkait dan masyarakat luas.

Adapun dasar hukum penyusunan LKJ BBRSEKP tahun 2024 adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain.
2. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
3. Sebagai umpan balik (*Feed back*) untuk perbaikan kinerja triwulan di tahun berikut

1.3 Tugas Dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri KP Nomor: 72 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan memiliki tugas ***melaksanakan penelitian di bidang sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.***

Dalam melaksanakan tugasnya, BBRSEKP menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

1. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
2. Perumusan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan riset dibidang ekonomi makro, inventarisasi dan tata kelola sosial ekonomi sumber daya, sistem usaha dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan alih teknologi, sosial budaya masyarakat, komunikasi, serta politik dan hukum kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan tata laksana, sarana, dan pelayanan jasa riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
5. Pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Tugas dan fungsi yang diemban tersebut merupakan salah satu indikator perubahan nomenklatur dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kepala BBRSEKP dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Sub Bagian Umum

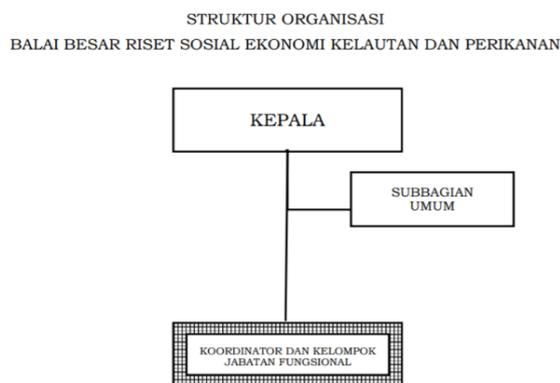
Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana riset.

B. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

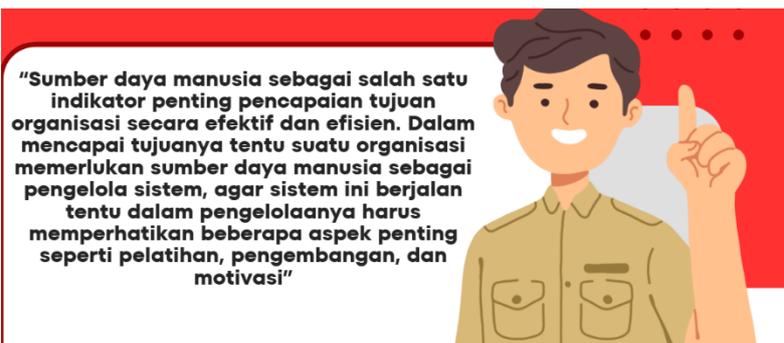
Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional menjalankan fungsi mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Adapun struktur organisasi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan sebagaimana Peraturan Menteri Nomor 72/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti terlihat pada gambar 1.



Gambar 2 . Struktur Organisasi BBRSEKP

1.4 Keragaan SDM



Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sampai dengan bulan desember ber jumlah 56 orang, terbagi dalam 5 (lima) yaitu SDM Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum, P3K, PPNPN serta Tenaga *Outsourcing*. Pada tahun 2024, kualitas SDM pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu mengembangkan, memperbaiki, dan memperkenalkan berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Komposisi dari pegawai yang berada di BBRSEKP, sebagai berikut :



Gambar 3 . Rincian PNS BBRSEKP



Gambar 4 . Komposisi Pegawai BBRSEKP

1.5 Potensi dan Permasalahan

1) Potensi

Potensi BBRSEKP yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan melalui Kelembagaan Riset.

Kelembagaan BBRSEKP dibentuk untuk mendukung capaian agenda pembangunan nasional, pengarusutamaan pembangunan KKP, dan arah riset BPPSDM KP. Sebagai bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, BBRSEKP memiliki struktur organisasi dalam rangka mewujudkan efektifitas organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. BBRSEKP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Adapun BBRSEKP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan riset di bidang ekonomi makro, inventarisasi dan tata kelola sosial ekonomi sumberdaya, sistem usaha dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan alih teknologi, sosial budaya masyarakat, komunikasi, politik dan hukum kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan tata laksana, sarana, dan pelayanan jasa riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
- d. pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil, dan monitoring dan evaluasi riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan ini dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dampaknya pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 adalah program dan kegiatan terkait riset sudah tidak dapat dilaksanakan.

Program riset pada BBRSEKP bertransformasi menjadi kegiatan Analisis Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang ditanggungjawab oleh Tim Kerja Analis Kebijakan Sosial Ekonomi (Ansos), yang mana hal ini merupakan eksekusi dari perubahan organisasi yang sangat dinamis. Kegiatan yang dilakukan secara fungsi masih berupa kegiatan yang mendukung program kegiatan di lingkup eselon I kementerian, merupakan kegiatan menganalisa suatu topik atau rencana program dan memberikan rekomendasinya. Tim kerja

ini melakukan kegiatan yang mendukung seluruh program BPPSDMKP dan program prioritas KKP.

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya perlu didukung adanya SDM yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur dan memiliki kompetensi di bidangnya. Pengembangan SDM yang berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi dapat mewujudkan suatu kinerja yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih optimal. Untuk mewujudkan SDM yang profesional dan kompeten khususnya dapat dilakukan melalui pembinaan karir dengan perpaduan antara sistem prestasi kerja dan sistem karir.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi (diklat, seminar, *workshop*) yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Sampai dengan tahun 2024, meski jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan di bawah S1 relatif kecil, yaitu sejumlah 1 orang (1,75%), namun kontribusi pegawai dimaksud dibutuhkan untuk menjalankan fungsi BBRSEKP dalam hal pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Kemudian jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S3 mempunyai tren yang menurun dibandingkan tahun 2021, karena adanya mutasi pegawai BBRSEKP ke Badan Riset Nasional sesuai dengan Perpres 78 Tahun 2021 maupun ke eselon I lainnya. Secara keseluruhan, jumlah pegawai BBRSEKP pada tahun 2024 berkurang sebesar 12,28% dibandingkan pada tahun 2023.

Terlepas dari kebijakan organisasi riset yang sedang dialami saat ini, BBRSEKP masih menghadapi beberapa tantangan untuk melaksanakan kegiatan organisasi kedepan, antara lain:

1. Laboratorium sosial ekonomi belum memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan spesifikasi sehingga membutuhkan anggaran untuk mengembangkan laboratorium sesuai standar dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi.
2. Kebutuhan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM fungsional perencana, pranata komputer, statistisi untuk meningkatkan keahlian terkait data analisis, programmer, desain grafis, *full-stack developer*, dll;
3. Sarana dan prasarana fisik perpustakaan belum sesuai standar perpustakaan;
4. Kondisi dan ketersediaan alat pengolah data yang sudah tidak up to date dan sesuai dengan kebutuhan terkini;
5. Jumlah ruangan pertemuan yang masih terbatas, kondisi saat ini ketersediaan ruang pertemuan digunakan bersama oleh beberapa satuan kerja yang masing-masing mempunyai frekuensi pertemuan yang tinggi.

2) Permasalahan

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan berkenaan dengan kebijakan tingkat nasional menyatukan kegiatan riset yang menyebabkan perubahan mendasar pada organisasi yang melaksanakan riset. Terbitnya peraturan Presiden No 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengambil alih tugas dan fungsi riset di kementerian dan lembaga sehingga kegiatan riset menjadi tidak lagi dapat dilaksanakan sejak Triwulan 3 Tahun 2022 sampai dengan saat ini selama organisasi baru belum terbentuk. Sehingga unit kerja yang memiliki tugas riset pada tahun 2022-2024 ini hanya melaksanakan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja dukungan manajerial.

1.6 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Tahunan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 terhadap rencana kinerja (*performance plans*) tahun 2024. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Cover Laporan

2. **Kata Pengantar**, berisi pengantar laporan dan dilengkapi dengan tanggal, bulan dan tahun serta di tanda tangani oleh Kepala BBRSEKP.

3. **Ringkasan Eksekutif**, berisi ringkasan dari laporan, meliputi: uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja, dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja .
4. **Bab I Pendahuluan**, berisi gambaran umum tentang organisasi, seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, keragaan pegawai dan organisasi serta potensi dan permasalahan.
5. **Bab II Perencanaan Kinerja**, berisi uraian singkat tentang Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun Berjalan, serta Pengukuran Kinerja.
6. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berisi capaian kinerja dari indikator- indikator kinerja telag ditetapkan. Untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang meliputi:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu (dua tahun terakhir);
- c. Membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realiasi kinerja tahun berjalan dengan standar nasional jika ada;
- e. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah di lakukan;
- f. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan pencapaian target kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

7. **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

8. **Lampiran**

- a. Perjanjian Kinerja; dan
- b. Lain – lain yang dianggap perlu

BAB 2

Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis

2.2 Rencana Kerja Tahunan

2.3 Perjanjian Kinerja

2.4 Pengukuran Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 merupakan acuan dan arahan bagi BBRSEKP dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam periode waktu lima tahun secara menyeluruh terintegrasi dan sinergis. Seiring berjalannya Kegiatan Renstra BBRSEKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang mengacu pada Undang-Undang Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Nasional (2020-2024), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.

Awalnya, pada tahun 2020, Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) telah menetapkan Rencana Strategis BPPSDMKP tahun 2020 - 2024 melalui Peraturan Kepala BRSDM Nomor 180/PER-BRSDM/2021 Tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2024. Menindaklanjuti Renstra BRSDM tersebut, BBRSEKP telah menetapkan Rencana Strategis BBRSEKP Tahun 2020- 2024 melalui Surat Keputusan Nomor 610 /BRSDM-BBRSEKP/TU.110/IV/2021 Kemudian untukantisipasi perubahan kelembagaan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) tindak lanjut implementasi amanat UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diturunkan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, yang memuat peleburan berbagai lembaga serta tugas dan fungsi riset ke dalam BRIN sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan.

Menindaklanjuti perkembangan perubahan arah kebijakan/program/ kegiatan yang mengakibatkan perubahan pada Sasaran/Indikator/volume target diperlukan reviu/evaluasi terhadap Sasaran/Indikator/volume target pada Renstra BBRSEKP tahun 2020 – 2024 berdasarkan analisis capaian, analisis tindak lanjut dan action plan yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja.

Pada tanggal 6 Desember 2021, melalui Nota Dinas Nomor 7142/BRSDM.1.RC.210/XII/2021, BPPSDM menyampaikan justifikasi usulan pemuktahiran Prioritas Nasional dan Major Project pada Rencana Kerja BRSDM Tahun 2021 ini kemudian

menjadi dasar tindak lanjut atas Rekomendasi Inspektorat III, Itjen KKP pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) BRSDM, bahwa BPPSDM perlu melakukan revisi RENSTRA BPPSDMKP Tahun 2020-2024 untuk merubah target jangka menengah yang disesuaikan dengan standar biaya per sasaran/per IK (biaya output/outcome) dan Indikator Kinerja Terbaru.

Selanjutnya sesuai dengan arahan BPPSDMKP, maka BBRSEKP melakukan perubahan target jangka menengah yang disesuaikan dengan standar biaya per sasaran/per IK (biaya output/outcome) dan Indikator Kinerja Terbaru sesuai dengan arahan BPPSDMKP.

A. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi KKP ini merupakan perwujudan Visi Presiden terpilih menetapkan visi 2020 – 2024 dalam sektor kelautan dan perikanan.

BPPSDMKP sebagai unit eselon 1 KKP mempunyai visi untuk mendukung visi KKP. Visi BPPSDMKP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

BBRSEKP yang merupakan unit di bawah BPPSDM mempunyai visi yang lebih spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BBRSEKP. Tugas dan fungsi BBRSEKP adalah melaksanakan kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Visi yang diusung oleh BBRSEKP ini tetap mendukung Visi BRSDM dan Visi KKP. Oleh karena itu visi BBRSEKP 2020 – 2024 adalah

“Menjadi Lembaga Riset Terkemuka Penghasil Rekomendasi Kebijakan dan Inovasi Rekayasa Sosial Ekonomi dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”



Visi tersebut mengandung kata-kata kunci yang dijabarkan sebagai **Lembaga Riset Terkemuka Penghasil Rekomendasi Kebijakan** adalah Lembaga riset yang:

1. Menciptakan iklim riset yang konsisten dan melahirkan hasil-hasil berupa rekomendasi kebijakan yang berdampak pada pengingkatan mutu kebijakan di sector kelautan dan perikanan.

2. Menjadikan hasil-hasil riset sebagai dasar dalam penyelenggaraan kebijakan pembangunan di sektor KP.

Terkemuka adalah menjadi pelopor dan rujukan utama dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Inovasi Rekayasa Sosial Ekonomi adalah menghasilkan kebaruan-kebaruan hasil riset yang dapat diimplementasikan dengan mempertahankan keberlanjutan SDKP untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat KP.

B. Misi

Misi BRSEKP mengacu pada misi BPPSDM yang menjalankan misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan yaitu:

1. **Misi ke-1** yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. **Misi ke-2** yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. **Misi ke-4** yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. **Misi ke-8** yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Misi BBRSEKP merupakan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi BBRSEKP, meliputi:

1. Menyediakan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing usaha kelautan dan perikanan melalui riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan inovasi rekayasa sosial;
2. Menyediakan rekomendasi kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan inovasi rekayasa sosial; dan
3. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBRSEKP.

C. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BBRSEKP, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan rumusan kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan sebagai landasan kebijakan kelautan dan perikanan (*science based policy*);
2. Menghasilkan model sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan;
3. Menghasilkan penerapan model integrasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang mendukung peningkatan peran adopsi teknologi terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan;
4. Menghasilkan *big data* sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan
5. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial riset dan SDM secara efektif dan efisien.

D. Sasaran Kegiatan BBRSEKP 2020-2024

Sasaran Kegiatan merupakan kondisi yang akan dicapai dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Hasil Reviu BPPSDMKP tahun 2021 – 2024 menetapkan lima sasaran program yang mengacu pada sasaran strategis KKP, yaitu:

SP-1 SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri

SP-2 SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan);

SP-3 Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuh kembangkan;

SP-4 Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat.

SP-5 Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan.

SP-6 Hasil Perumusan Kebijakan dan Inkubator Bisnis Kelautan dan Perikanan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

SP-7 Hasil riset yang dimanfaatkan oleh sektor Industri.

SP-8 Hasil riset KP yang digunakan dalam penyusunan kebijakan

SP-9 Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BRSDM

Sebagai unit kerja Eselon II, BBRSEKP melaksanakan kegiatan yang di *cascading* dari sasaran strategis (SP) BPPSDMKP menjadi sasaran kegiatan (SK) BBRSEKP yaitu **SP-9** diturunkan menjadi SK -2 sebagai sasaran kegiatan yang harus dicapai yaitu:

SK-2 Tatakelola pemerintahan yang baik di BBRSEKP

Gambar 4. Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan dalam Renstra BBRSEKP 2020-2024



Sasaran Kegiatan BBRSEKP 2024

Berdasarkan uraian sebelumnya peta strategis kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh BBRSEKP pada Tahun 2024 seperti pada Gambar dibawah ini :



Gambar 5. Peta Strategis Kegiatan BBRSEKP 2024

Metode pengukuran capaian sasaran kegiatan tersebut dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja (IK) atau *Key Performance Indicator*, disingkat KPI pada masing - masing sasaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balance scorecard* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitupada <http://Kinerjaku.kkp.go.id> dengan pengukuran 2 strategis kegiatan sebagai berikut :

a) Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan ke satu (SK- 1) yang akan dicapai adalah “**Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan BBRSEKP**” dengan Indikator Kinerja :

1. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria BBRSEKP (NSPK) pada tahun 2024 sebanyak 3 NSPK

b) Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan ke dua (SK-2) yang akan dicapai adalah “Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker” dengan Indikator Kinerja:

1. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks), pada tahun 2024 senilai 76 indeks;
2. Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%) pada tahun 2024 sebesar 85%;
3. Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%), pada tahun 2024 sebesar 100%;
4. Persentase Efektifitas penyebaran informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%), pada tahun 2024 sebesar 90,5%;
5. Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket), pada tahun 2024 sebanyak 3 paket;
6. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%), pada tahun 2024 sebesar 94%;
7. Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP (Proposal), pada tahun 2024 sebanyak 1 proposal;
8. Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai), pada tahun 2024 senilai 86,50;
9. Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai), pada tahun 2024 senilai 93,76;
10. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai), pada tahun 2024 senilai 71;
11. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai), pada tahun 2024 senilai 94;
12. Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai) pada tahun 2024 senilai 81.
13. Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%), pada tahun 2024 sebesar 98,00%

14. Batas Tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BBRSEKP(%) pada tahun 2024 sebesar $\leq 0,50\%$
15. Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-reakreditasi (Indeks Jurnal), pada tahun 2024 sebanyak 1
16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%), pada tahun 2024 sebesar 82%
17. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai), pada tahun 2024 senilai 85,00
18. Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%), pada tahun 2024 sebesar 77,80%
19. Layanan Perkantoran BBRSEKP (%), pada tahun 2024 sebesar 100%

2.2 Rencana Kerja Tahunan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BBRSEKP Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. Rencana Kerja BBRSEKP Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran (Rp.000) Awal	Anggaran Revisi VII (Rp.000)	Anggaran Revisi VIII (Rp.000)	Anggaran Revisi X (Rp.000)	Anggaran Revisi XII (Rp.000)
1	Tersedianya Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kegiatan	1.000.000 Blokir AA	1.000.000 Blokir AA	1.000.000 Blokir AA	1.000.000 Blokir AA	1.000.000 Blokir AA
2	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	-	1.500.000	800.000	800.000	779.440
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	11.300.000	11.300.000	11.300.000	10.435.000	10.222.760
Total Anggaran Tahun 2024		12.300.000	13.800.000	13.100.000	12.235.000	12.002.200

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja BBRSEKP level 2 dibuat sebagai pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang diturunkan dari rencana kerja tahun 2024 kementerian dan program BPPSDMKP. Dokumen perjanjian kinerja memuat informasi tentang program, sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta alokasi anggaran per tahun. Tahun 2024 BBRSEKP telah menetapkan rencana untuk merealisasikan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja sebagai penjabaran atas sasaran program Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dan ditandatangani oleh Kepala BSDMKP Bersama dengan Kepala BBRSEKP pada tanggal 27 Desember 2023, namun dari 20 IK pada BBRSEKP terdapat 1 IK yang terdampak dari Blokir AA DJA yaitu IK Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Rekomenjak).

Seiring berjalannya kegiatan terdapat perubahan atau revisi Perjanjian Kinerja (PK) berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan diantaranya:

1. Nomor B.1896/BBRSEKP.1/RC.610/X/2024 tertanggal 23 September 2024 tentang Penyampaian Revisi Perjanjian Kinerja BBRSEKP Tahun 2024 dan Rancangan Perjanjian Kinerja BPPSDM Tahun 2024.

Adapun indikator kinerja yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

- 1) Penambahan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja “Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan BBRSEKP / Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria BBRSEKP (NSPK)” berkenaan dengan revisi pergeseran anggaran Kegiatan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;
- 2) Perubahan target Indikator Kinerja “Indeks Profesional ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks)” semula 80 menjadi senilai 76 berkenaan dengan berkurangnya jumlah pegawai sebanyak 4 pegawai atau setara dengan 7% dari total pegawai;
- 3) Perubahan target Indikator Kinerja “Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai)” semula 88 menjadi senilai 86.5 berkenaan dengan blokir anggaran kegiatan (pengurangan anggaran semula Rp76.500.000,00 menjadi Rp20.920.000,00);
- 4) Perubahan target Indikator Kinerja semula “Nilai Kinerja Anggaran BBRSEKP (Nilai)” menjadi “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)” dan target semula 82 menjadi 71 berkenaan dengan perubahan target pada Level I sesuai Nota Dinas

Kepala Biro Keuangan dan BMN perihal Revisi Target dan Manual IKU NKA KKP Tahun 2024.

2. Nomor B.1983/BBRSEKP.1/RC.610/X/2024 tertanggal 4 Oktober 2024 tentang Penyampaian Revisi Perjanjian Kinerja BBRSEKP Tahun 2024, perubahan tersebut hanya terkait total pagu anggaran BBRSEKP dimana semula Rp13.100.000.000 menjadi Rp12.235.000.000 namun, perubahan PK tidak merubah IK maupun target IK
3. Nomor B.2638/BBRSEKP/RC.610/XII/2024 tertanggal 27 Desember 2024 tentang Penyampaian Revisi Perjanjian Kinerja BBRSEKP Tahun 2024, perubahan tersebut hanya terdapat pada target indikator kinerja kegiatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria BBRSEKP (NSPK) dengan target semula 2 NSPK menjadi 3 NSPK.

Adapun Indikator Kinerja tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4. Perjanjian Kerja BBRSEKP Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET PK
1	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan BBRSEKP	1	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria BBRSEKP (NSPK)	3
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	2	Indeks Profesional ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks)	76
		3	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%)	85
		4	Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%)	100
		5	Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%)	90,5
		6	Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket)	3
		7	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%)	94
		8	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP	1
		9	Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP	86,50
		10	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	93,76
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP	71
		12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai)	94
		13	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	81
		14	Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)	98

	15	Batas Tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BBRSEKP (%)	≤ 0,5
	16	Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-reakreditasi (Indeks Jurnal)	1
	17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	82
	18	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai)	85
	19	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%)	77,80
	20	Layanan Perkantoran BBRSEKP (%)	100

2.4 Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BBRSEKP Tahun 2024, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IK, akan diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IK adalah sebagai berikut:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Metode pengukuran kinerja pada BBRSEKP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Pengukuran dilakukan oleh Tim SAKIP dan Laporan Kinerja BBRSEKP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP Nomor: 65/KEP-BPPSDMKP-BBRSEKP/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Sistem

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Keanggotaan Tim Pengelola Kinerja terdiri dari seluruh Koordinator yang bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator kinerja dan staf dan tim sekretariat. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau melalui kegiatan monitoring dan evaluasi per triwulan yang dihadiri penanggung jawab dan Tim Pengelola Kinerja. Hasil pemantauan dan pengukuran diinput kedalam aplikasi Kinerjaku untuk selanjutnya dilakukan validasi oleh sekretariat BPPSDMKP.

BAB 3

Akuntabilitas

Kinerja

3.1. Capaian Kinerja BBRSEKP Tahun 2024

3.2. Evaluasi Dan Analisis Kinerja

3.3. Realisasi Keuangan

3.4. Analisis Efisiensi Anggaran

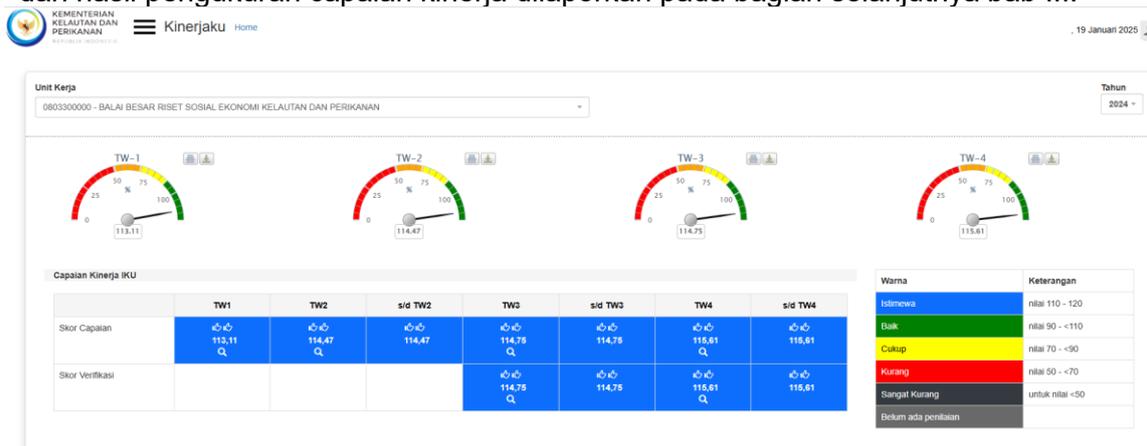


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja BBRSEKP Tahun 2024

Pada tahun 2024, BBRSEKP telah menetapkan 20 (Dua Puluh) IK, dimana realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa sasaran kegiatan telah dapat dicapai dengan rata-rata capaian sebesar **115,61% (Istimewa)** (Gambar 2). Uraian rincian dari hasil pengukuran capaian kinerja dilaporkan pada bagian selanjutnya bab III.



Gambar 6. Dashboard Kinerja BBRSEKP Tahun 2024 sebagaimana pada aplikasi <http://Kinerjaku.kkp.go.id>

Keberhasilan pencapaian sasaran diantaranya karena faktor pengendalian monitoring dan evaluasi kegiatan pada BBRSEKP yang cukup ketat, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir kegiatan. Terutama ketika mengalami perlambatan karena adanya perubahan transformasi struktur organisasi menjadi fungsional dan menunggu terbitnya SOTK organisasi baru belum sepenuhnya yang mana monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan sangat efektif mengawal agar kegiatan dapat tetap dilaksanakan. Upaya pemantauan menghasilkan beberapa upaya dan langkah antisipatif agar kegiatan tetap berjalan sesuai rencana dengan melakukan beberapa perubahan dan metode dalam pelaksanaan kegiatan pada BBRSEKP. Kegiatan pengelolaan kinerja dituangkan dalam Surat Tugas Kepala BBRSEKP Nomor: 39/KEP-BPPSDMKP-BBRSEKP/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Tahun 2024

Monitoring dan evaluasi realisasi capaian PK online juga dilakukan melalui aplikasi yang difasilitasi oleh kementerian Kelautan dan Perikanan melalui website <http://Kinerjaku.kkp.go.id>. Pengisian aplikasi kinerjaku oleh BBRSEKP setelah pelaksanaan pemantauan rutin terhadap perkembangan capaian melalui kegiatan monev rencana aksi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan monev dilakukan untuk memastikan tercapainya target IK yang tercantum di dalam PK dan target kegiatan per komponen. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau capaian kinerja setiap bulan ataupun triwulan beserta kendala yang dihadapi Pemantauan secara periodik dilakukan sebagai Langkah antisipatif dan

preventif terhadap indikator yang memiliki risiko tinggi untuk dicapai atau mungkin tidak dapat mencapai target.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan dengan membandingkan antara target dengan capaiannya. Evaluasi dan analisis kinerja juga dilakukan untuk melihat sejauh mana target kinerja tahun berjalan dapat direalisasikan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja. Analisis capaian kinerja diukur untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan, membandingkan kinerja tahun 2024 dengan kinerja tahun 2023. Analisis dan evaluasi capaian kinerja BBRSEKP tahun 2024 menurut penetapan dua sasaran kegiatan. Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan BBRSEKP yang disusun pada bulan Desember 2024 (revisi) saat ini memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu SK-1. Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan BBRSEKP, serta SK-2 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker memiliki 20 (dua puluh) Indikator Kinerja.

Selain itu, analisis capaian kinerja juga menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan kinerja menurun, efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau berkontribusi terhadap penurunan kinerja BBRSEKP pada tahun 2024. Hasil analisis capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan sebagaimana pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 5. Capaian Kerja BBRSEKP Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian 2024	% Capaian
1	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan BBRSEKP	1 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria BBRSEKP (NSPK)	3	4	120
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	2 Indeks Profesional ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks)	76	89,46	117,71
		3 Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%)	85	97,40	114,59
		4 Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%)	100	121	120
		5 Persentase Efektifitas penyebaran informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%)	90,50	123,50	120
		6 Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket)	3	3	100
		7 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%)	94,00	133,33	120

		8	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP (Inovasi)	1	1	100
		9	Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai)	86,50	92,00	106,36
		10	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	93,76	99,29	105,90
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	71	100	120
		12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai)	94	98,53	104,82
		13	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	81	83,65	103,27
		14	Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)	98,00	99,86	101,90
		15	Batas Tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BBRSEKP (%)	≤0,5	0,10	120
		16	Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-reakreditasi (Indeks Jurnal)	1	1	100
		17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	82	100	120
		18	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai)	85	95,40	112,24
		19	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%)	77,80	100	120
		20	Layanan Perkantoran BBRSEKP (%)	100	100	100

Capaian Kinerja Pada Sasaran Kegiatan 1

Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan BBRSEKP

Indikator Kinerja 1.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria BBRSEKP (NSPK)

IK Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria BBRSEKP (NSPK) merupakan jumlah NSPK yang disiapkan terkait dengan penyelenggaraan identifikasi, penilaian dan rancangan rekayasa sosial dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas KKP dan BPPSDMKP. NSPK disusun dengan melibatkan *stakeholder* dan Bagian Hukum Sekretariat BRSDM dan atau Biro Hukum sesuai dengan tingkat kewenangan NSPK yang dibuat.

Capaian IK Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria BBRSEKP (NSPK) sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian IK Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria BBRSEKP (NSPK)

IK-1. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria BBRSEKP (NSPK)										
Realisasi Tahunan				2024					Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW IV	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	% Kenaikan 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	-	2	3	3	4	120	-	3	120
Persentase Capaian Tahunan				Persentase Capaian			Kenaikan/Penurunan Capaian Tahun 2023-2024		Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
-	-	-	120	100	120		-		100	20

Capaian IK 1 Pada Tahun 2024 capaian telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu dengan target 3 dan capaian 4 atau sama dengan 120%. Capaian sesuai dengan memo penanggungjawab IK Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Nomor : 3/BBRSEKP/TU.210//2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Penyampaian Hasil Capaian IK Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria BBRSEKP (NSPK), Capaian IK juga dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/IK2_NSPK2024

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya secara persentase capaian IK ini tidak terjadi peningkatan maupun penurunan capaian atau sama dengan 120%, namun jika dibandingkan dengan capaian 5 tahunan sebagaimana pada tabel, untuk IK ini tidak dapat dibandingkan karena IK merupakan IK baru yang dibentuk di tahun 2023 untuk mengakomodir kegiatan pada BBRSEKP terkait Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Jika dibandingkan dengan Satker eselon 2 pada Kementerian lain maupun satker di lingkungan BPPSDMKP yaitu Pusat Penyuluhan Kelautan Dan Perikanan (Pusluh KP) dapat di lihat pada tabel dibawah ini

Tabel 7. Perbandingan capaian IK 1 dengan satker BRPH - KLHK

No	Satuan Kerja	Target 2024	Capaian 2024	Persentase
1	BBRSEKP – BPPSDMKP	3	4	120
2	Pusluh KP – BPPSDMKP	4	4	100
3	Bina Rencana Pemanfaatan Hutan – KLHK	2	2	100

Capaian IK Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria BBRSEKP (NSPK) lebih rendah jika dilihat dari sisi target, namun jika berdasarkan pada persentase maka capaian pada BBRSEKP lebih tinggi dibandingkan dengan Pusluh KP.

Adapun faktor yang menyebabkan keberhasilan capaian indikator kinerja ini, antara lain:

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar eselon I KKP dalam memberikan masukan yang dibutuhkan;

2. Kebutuhan standarisasi dan sertifikasi NSPK oleh tenaga ahli di lingkungan KKP;
3. Koordinasi dan komunikasi yang baik untuk mengkomunikasikan informasi hasil kegiatan antara BBRSEKP dengan pemangku kepentingan;
4. Rapat teknis dengan penasehat dan tim pengarah terkait pelaksanaan assesmen, identifikasi, dan penyusunan model rancangan rekayasa sosial program kampung nelayan maju tahun 2024 serta
5. Koordinasi dan komunikasi yang baik antar tim pelaksana kegiatan untuk memastikan dan memantau perkembangan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Pelaksanaan assesmen, identifikasi, dan penyusunan model rancangan rekayasa sosial program kampung nelayan maju tahun 2024 oleh tim Analisis Kebijakan BBRSEKP berkontribusi dalam menghasilkan capaian IK NSPK sehingga tersusun Surat Tugas dari Kepala BBRSEKP tentang Tim Penyusunan Norma, Standar Prosedur Dan Kriteria Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan ST Nomor B.1799/BBRSEKP/KP.440/IX/2024 tanggal 9 september 2024
2. Pelaksanaan kegiatan pada calon lokasi percontohan yang di laksanakan oleh BBRSEKP lalu selanjutnya data yang di peroleh disusun menjadi rancangan pedoman asesmen meliputi aspek sosial ekonomi untuk mendukung pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir, perubahan prilaku dan peningkatan kompetensi dalam mendukung program budidaya berkelanjutan, perekayasaan sosial pada program pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan serta penyusunan buku sketsa kampung nelayan.
3. Pengumpulan bahan, dokumentasi, data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (NSPK) Tahun 2024.
4. Penyusunan buku pedoman rancangan NSPK yang di lakukan bersama antara tim analisis sosial ekonomi (ansos) BBRSEKP dengan narasumber tim pakar dari Yayasan Baruna Nusantara, Lembaga Narabahasa serta Tim Jurnal Kemendiktisaintek.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan “Penyusunan NSPK Standarisasi dan Sertifikasi” dengan pagu anggaran sebesar Rp779.440.000 Dan realisasi anggaran sebesar Rp777.573.069 (99,76%) jika dibandingkan dengan persentase capaian sesuai kinerja IK sebesar 120% maka terdapat efisiensi sebesar 20,24 atau sama dengan kegiatan berjalan efisien.



Ket : pengukuran dampak SFV desa Ajakjang makasar



Ket : Penyusunan Buku NSPK dengan Tim Pakar

Gambar 7. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 1 NSPK

Capaian Kinerja Pada Sasaran Kegiatan 2

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja 2.

Indeks Profesional ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks)

IK Indeks profesionalitas ASN Lingkup BBRSEKP merupakan indikator yang dibentuk seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. IK ini diukur secara Semesteran. Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara No. 006//B-BM.02.01/SD/C/2024 Tanggal 22 Mei 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 dan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi terjadi perubahan pengukuran indeks IP ASN sebagai berikut:

1. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) pada Layanan indeks Profesionalitas ASN.
2. Penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 8. Penyesuaian Bobot Kualifikasi IP ASN

NO	DIMENSI	JENJANG JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
				S3	S2	S1/DIV	DIII	DI/DI/SMA/ SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
1	Kualifikasi	JPT	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
		Jabatan Fungsional (Keterampilan)	SLTA	25	23	22	21	20	10
			DIII	25	23	21	20	10	5
		Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
S2	25		20	15	10	5	1		
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	23	22	21	20	10

Tabel 9. Penyesuaian Bobot Kompetensi IP ASN

DIMENSI	JENJANG JABATAN	PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DI IKUTI (BOBOT)							
		PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN		PELATIHAN FUNGSIONAL		PELATIHAN TEKNIS		SEMINAR/KONFERENSI/SARASEHAN/WORKSHOP/LOKAKARYA/SEJENISNYA	
		SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	>= 20 JP	< 20 JP	SUDAH	BELUM
Kompetensi	JPT	15	-	-	-	15	Proposional	10	-
	Jabatan Administrator	15	-	-	-	15	Proposional	10	-
	Jabatan Pengawas	15	-	-	-	15	Proposional	10	-
	Jabatan Fungsional	-	-	15	-	15	Proposional	10	-
	Jabatan Pelaksana	-	-	-	-	15	Proposional	17,5	-

Tabel 10. Penyesuaian Bobot Kinerja IP ASN

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Tabel 11. Penyesuaian Bobot Disiplin IP ASN

DIMENSI	INDIKATOR	BOBOT DIMENSI MAKSIMAL	BOBOT SUB
Disiplin	Data/Informasi Riwayat Hukuman Disiplin	5	
	1 Tidak Pernah Dikenai Hukuman Disiplin		5
	2 Pernah Dikenai Hukuman Disiplin		
	a. Ringan		3
	b. Sedang		2
c. Berat	1		

Tabel 12. Capaian IK Indeks Profesional ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks)

IK-2. Indeks Profesional ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks)										
Realisasi Tahunan				2024					Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW IV	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
82,75	86,81	83,68	87,26	76	76	89,46	117,71	2,46	82	109,58
Persentase Capaian Tahunan				Persentase Capaian				Kenaikan/Penurunan Capaian Tahun 2023-2024	Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
114,93	120	117,86	116,35	100		117,71		1,15	100	117,71

Capaian IK 2 Pada Tahun 2024 capaian telah melebihi dari target yang telah di tetapkan yaitu dengan target 76 dan capaian 89,46 atau sama dengan 117,71%, capaian sesuai dengan surat Sekretaris BPPSDMKP Nomor B. B.222/BPPSDM.1/TU.210/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Capaian IP ASN lingkup BPPSDM Tahun 2024. Capaian IK juga dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/DadukIPASN_BBRSEKP2024

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terjadi kenaikan sebesar 2,46%, jika dibandingkan dengan capaian kinerja 5 tahunan, untuk IK ini cukup fluktuatif dikarenakan adanya peningkatan maupun penurunan target yang disebabkan adanya perpindahan pegawai ke Badan Riset Nasional (BRIN) serta ke eselon I lainnya di lingkup BPPSDMKP, sedangkan perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra 2024 sudah mencapai 9,58%.

Jika dibandingkan dengan K/L lainnya seperti pada Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama dan satker sejenis di Lingkungan BPPSDMKP, antara BBRSEKP dengan BBRP2BKP maka capaian pada BBRSEKP lebih rendah, namun jika dengan Pusdiklat TA Kemenag, capaian BBRSEKP lebih tinggi hal ini dikarenakan terdapat beberapa pegawai yang terlambat mengunggah sertifikat pada komponen kompetensi, namun jika dilihat dari kinerja dan kualifikasi maka BBRSEKP lebih baik, adapun rincian capaian perkomponen sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 13. Perbandingan Capaian IK 2 dengan K/L Pusdiklat TA Kemenag dan satker BBRP2BKP

Nama Satker	Capaian Per Komponen IK IP ASN		
	Target	Realisasi	Keterangan
BBRSEKP	76	89,46	Tinggi
BBRP2BKP	79	91,74	Sangat Tinggi
Pusdiklat TA - Kemenag	78	78	Cukup

Keberhasilan pencapaian IK Indeks Profesional ASN BBRSEKP disebabkan antara lain oleh kegiatan pengembangan kompetensi berupa Bimbingan Teknis Keterampilan Menulis Efektif yang dilkTi seluruh pegawai. Disamping itu, keaktifan pegawai pada kegiatan-kegiatan webinar atau pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan secara daring oleh instansi lain menjadi faktor pemicu keberhasilan pencapaian IK ini, serta peran aktif dari pegawai yang melaksanakan dan melaporkan kelKtsertaannya dalam berbagai kegiatan peningkatan kompetensi, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, terutama dalam diklat 20 JP dan seminar/webinar;

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain:

1. Faktor perencanaan dan pengembangan SDM Aparatur yang telah disusun secara berkala dengan pelayanan kegiatan yang baik dan penyampaian informasi pelatihan dan webinar melalui apel pagi;
2. Peran aktif operator e-pegawai di dalam membantu mengunggah bukti kelKtsertaan tersebut, disamping pegawai yang bersangkutan juga dapat melakukannya secara mandiri melalui aplikasi e-pegawai;

3. Menyusun dan/ atau melakukan upload file ke dalam tautan yang telah ditentukan terkait kualifikasi, kompetensi dan disiplin pegawai;
4. Berkoordinasi dengan Biro SDMAO terkait kualifikasi pendidikan IP ASN.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Perencanaan SDM Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp75.480.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp72.851.539, jika dibandingkan dengan persentase capaian sesuai kinerja IK sebesar 117,71% maka terdapat efisiensi sebesar 21,19 atau sama dengan kegiatan berjalan sangat efisien.



Ket : Rapat Pembahasan Terkait SKP



Ket : Pelatihan Analisis Jabatan Dan Beban Kerja

Gambar 8. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 2

Indikator Kinerja 3.

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%)

IK Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%) merupakan kegiatan dalam rangka penguatan dan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan jenjang individu atau kelompok baik dalam bentuk pelatihan/training maupun diklat.

Peningkatan kapasitas SDM ini merupakan dimensi kompetensi yang digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kapasitas kompetensi yang pernah dimiliki oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan dan tugas organisasi. Indikator yang digunakan yaitu kelengkapan atau riwayat pengembangan kapasitas kompetensi yang terdiri atas:

- a. Diklat Fungsional
- b. Diklat 20 JP
- c. Diklat Teknis
- d. Diklat lainnya.

Tabel 14. Capaian IK Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%)

IK-3. Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP(%)										
Realisasi Tahunan				2024					Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW IV Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	-	94,10	85	85	97,40	114,59	3,51	82	118,78
Persentase Capaian Tahunan				Persentase Capaian			Kenaikan/Penurunan Capaian Tahun 2023-2024		Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
-	-	-	-	100	120		3,14		100	120

Capaian IK 3 Pada Tahun 2024 capaian telah melebihi dari target yang telah di tetapkan yaitu dengan target 85% dan capaian 97,40% atau sama dengan 114,59%, capaian sesuai dengan surat Penanggungjawab IK Nomor B.2647 /BBRSEKP/TU.330/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Capaian IK “Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%)” TW IV Tahun 2024”. Capaian IK juga dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/IKM_KapasitasSDM2024

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terjadi kenaikan sebesar 3,51% namun, jika dibandingkan dengan capaian kinerja 5 tahunan untuk IK ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan karena IK merupakan IK baru yang dibentuk di tahun 2023 untuk mengakomodir kegiatan pada BBRSEKP terkait Pengembangan SDM Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, namun jika dibandingkan dengan target jangka menengah, untuk IK ini sudah melebihi dari target tahunan sebesar 18,78%.

Jika dibandingkan dengan satker sejenis K/L seperti Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, Kementerian Pertanian dapat di lihat pada tabel dibawah ini

Tabel 15. Perbandingan capaian IK 3 dengan satker BBPPL - Kementan

No	Satuan Kerja	Target 2024	Capaian 2024	Persentase
1	BBRSEKP – BPPSDMKP	85	97,40	114,59
2	BBPPL – Kementan	90	99,13	110,14

Capaian IK peningkatan kapasitas SDM antara BBRSEKP dengan BBPL Kementan, capaian BBPPL lebih tinggi dibandingkan BBRSEKP dari sisi target maupun capaian.

Keberhasilan pencapaian Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP disebabkan antara lain tersedianya pelatihan untuk peningkatan keterampilan/keahlian pejabat fungsional yang sesuai dengan bidangnya, tersedianya alokasi waktu dari pegawai untuk melaksanakan pelatihan serta partisipasi pegawai dengan mengIKti dan melaporkan

kegiatan peningkatan yang diselenggarakan oleh instansi lain sebagai faktor pemicu keberhasilan pencapaian IK ini.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain faktor perencanaan dan pengembangan kompetensi yang telah di susun secara berkala dan penyampaian informasi pelatihan kompetensi melalui whatsapp group di BBRSEKP maupun melalui apel pagi, peremajaan dan majemen data pegawai, pemantauan secara berkala yang dilakukan oleh pengelola kepegawaian BBRSEKP terhadap pegawain baik PNS, PPPK maupun PPNPN, serta melakukan koordinasi pelaksanaan penilaian kompetensi oleh BKN.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Pengembangan SDM Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp54.520.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp52.855.200, jika dibandingkan dengan persentase capaian sesuai kinerja IK sebesar 114,59% maka terdapat efisiensi sebesar 17,64 atau sama dengan kegiatan berjalan cukup efisien.



Ket : Webinar Urgensi Sertifikasi Kompetensi



Ket : Rapat Sosialisasi rekonsiliasi data tenaga Non ASN dan Pengadaan PPPK

Gambar 9. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 3

Indikator Kinerja 4.

Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%)

IK Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%) merupakan Naskah/bahan/dokumen berupa *briefing note*, lembar sebar, bahan presentasi, *policy brief*, *policy paper*, *policy note* dan dan atau lainnya yang dibuat dan dimanfaatkan oleh Kepala BBRSEKP. Naskah/bahan/dokumen tersebut merupakan tindak lanjut hasil disposisi dari Kepala BBRSEKP kepada Tim Kerja lingkup BBRSEKP yang dimanfaatkan oleh Kepala BPPSDMKP atau Eselon I lainnya sebagai bahan rapat pimpinan maupun pengambilan kebijakan.

Tabel 16. Capaian IK Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan

IK-4. Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%)										
Realisasi Tahunan				2024					Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW IV 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	120	118,75	100	100	121	120	1,89	100	120
Persentase Capaian Tahunan				Persentase Capaian				Kenaikan/ Penurunan Capaian Tahun 2023-2024	Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
-	-	120	118,75	100	120		1,05	100	120	

Capaian IK 4 pada Tahun 2024 ditargetkan pada angka 100 capaian IK adalah 121% atau sebesar 120%, capaian sesuai dengan surat penanggungjawab IK Nomor B. B.2648/BBRSEKP/TU.210/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Capaian IK “Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%)” Triwulan IV Tahun 2024, Capaian IK juga dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/IK5_BahanPimpinan2024

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, untuk IK ini mengalami peningkatan capaian sebesar 1,89% namun, jika dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan, untuk IK ini tidak dapat dibandingkan, karena IK baru dibentuk di tahun 2022, sedangkan perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra 2024 capaian sudah melebihi target renstra sebesar 20%.

Jika dibandingkan dengan satker sejenis di Lingkungan BPPSDMKP seperti BBRPPBKP, untuk IK ini tidak dapat dibandingkan dengan satker di lingkungan BPPSDMKP karena keberadaan IK ini untuk mendukung kegiatan tata usaha dan kerumahtanggaan di BBRSEKP.

Keberhasilan pencapaian IK Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%) disebabkan antara lain adanya koordinasi atau konsultasi serta terjalinnya komunikasi yang baik antara BBRSEKP dengan Eselon I lainnya terkait prosedur penyusunan bahan pimpinan, faktor lainnya adalah adanya permintaan materi baik *briefing note*, bahan *presentase* maupun lembar sebar dari Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP maupun Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain faktor penugasan atas permintaan penyelesaian dan tindak lanjut penugasan dari pimpinan secara aktif dan responsif sehingga permintaan maupun penugasan atas penyelesaian dan tindak lanjut dapat disusun dan

disampaikan tepat waktu serta pengawalan tim monev terkait permintaan hasil kegiatan melalui monitoring dan evaluasi.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Pelayanan Tata Usaha Dan Kerumahtanggan” dengan pagu anggaran sebesar Rp182.777.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp181.550.494, jika dibandingkan dengan persentase kinerja IK dengan capaian sebesar 120% maka terdapat efisiensi sebesar 20.67% maka kegiatan dapat dikatakan cukup efisien.



Ket : Koordinasi terkait pencapaian bahan pimpinan yang ditindaklanjuti



Ket : Penyusunan tindak lanjut permintaan bahan pimpinan oleh tim kehumasan

Gambar 10. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 4

Indikator Kinerja 5.

Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%)

IK Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%) merupakan tindakan komunikasi menyebarkan informasi secara luas baik dalam kegiatan/acara membagikan pengetahuan atau wawasan yang menghadirkan pembicara ahli dengan peserta yang membahas topik tertentu (seminar/webinar/FGD) ataupun sosialisasi kegiatan melalui sarana media sosial seperti instagram, facebook, tiktok.

Nilai efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian dari penyebarluasan informasi sosial ekonomi KP yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Engagement rate adalah metrik standar yang dimanfaatkan dalam digital marketing untuk mengukur hasil dari suatu konten. Cara ini banyak digunakan pagi digital marketer yang memanfaatkan Instagram sebagai media pemasaran.

Tabel 17. Capaian IK Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%)

IK-5. Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP(%)											
Realisasi Tahunan				2024					Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)		
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW IV	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	% Penurunan Capaian 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024	
-	-	120	131	90,50	90,50	123,50	120,00	5,73	100	120	
Persentase Capaian Tahunan				Persentase Capaian				Kenaikan/Penurunan Capaian Tahunan 2023-2024	Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)		
-	-	120	120	100	120		-	100	120		

Capaian IK 5 Pada Tahun 2024 capaian telah melebihi dari target yang telah di tetapkan yaitu dengan target 90,50 dan capaian 123,50 atau sama dengan 120%. Capaian sesuai dengan surat penanggungjawab IK Nomor B.2552/BRSDM-BBRSEKP/TU.210/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Capaian IK “Persentase Efektifitas penyebarluasan infromasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%) (IK) Triwulan IV “, bukti dukung capaian IK juga dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/Konten-Efektifitas2024>

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, untuk IK ini terjadi penurunan capaian sebesar 5,73% hal ini dikarenakan adanya transformasi pegawai sehingga tidak banyak konten yang di produksi di bulan Juli, Jika dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan, untuk IK ini tidak dapat dibandingkan, karena IK baru di bentuk di tahun 2023, sedangkan perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra 2024 sudah melebihi target renstra sebesar 20%.

Jika dibandingkan dengan satker sejenis di Lingkungan BPPSDMKP seperti BBRPPBKP, untuk IK ini tidak dapat dibandingkan dengan satker di lingkungan BPPSDMKP karena keberadaan IK ini untuk mendukung kegiatan kehumasan di BBRSEKP.

Keberhasilan pencapaian Persentase Efektifitas Penyebarluasan Informasi Kegiatan Sosial Ekonomi disebabkan antara lain penyebarluasan informasi kegiatan sosial ekonomi melalui medial sosial Instagram, Twitter, Tiktok dan Youtube, disamping itu operator yang handal dalam membuat konten di media sosial sehingga dapat menarik pengunjung untuk melihat informasi kegiatan di BBRSEKP.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain faktor keaktifan operator dalam mengunggah konten kedalam media sosial BBRSEKP, membuat konten di media sosial, adanya pemantauan dan evaluasi kegiatan media sosial BBRSEKP serta Rapat internal terkait kegiatan pelayanan informasi publik dengan BRSDMKP.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Pengelolaan Konten Publikasi Media Sosial” dengan pagu anggaran sebesar Rp4.447.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.436.153, jika dibandingkan dengan persentase kinerja IK dengan capaian sebesar 120% maka terdapat efisiensi sebesar 20,24% maka kegiatan dapat dikatakan cukup efisien.



Ket : menghadiri forum keterbukaan informasi publik yang diadakan oleh Pusdatin KP



Ket : Workshop pengelolaan konten

Gambar 11. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 5

Indikator Kinerja 6.

Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket)

IK Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket) merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jumlah jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama kajian, analisis dan perhitungan di bidang kelautan dan perikanan. Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/ organisasi lainnya yang memiliki kesamaan profesi/kepakaran yang di IKti oleh Satker/ UPT lingkup BPPSDMKP.

Tabel 18. Capaian IK Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket)

IK-6. Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket)											
Realisasi Tahunan				2024					Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)		
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TV IV 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	% penurunan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024	
9	12	-	4	3	3	3	100.00	25	3	100	
Persentase Capaian Tahunan				Persentase Capaian				Kenaikan/Penurunan Capaian Tahun 2023-2024	Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)		
100	120	-	120	100	100		20	100	100		

Capaian IK 6 Pada Tahun 2024 capaian telah tercapai bahkan sesuai target yang telah di tetapkan yaitu dengan target 3 dan capaian 3 atau sama dengan 100%, capaian sesuai dengan memo penanggungjawab IK Nomor 4 /BBRSEKP/TU.210/II/2025 tanggal 3 Januari 2025, bukti dukung capaian IK juga dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/IK6_KerjasamaBBRSEKP2024

capaian sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 19. Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP

No	Mitra Kerjasama	Bentuk Kerjasama	Nomor Perjanjian	Judul Kegiatan	Masa Berlaku
1	Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Brawijaya	Perjanjian Kerjasama (PKS)	30/BRSDM/KKP/PKS/V III/2019	Pengembangan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Agustus 2024
2	<i>Sustainable Fisheries Partnership Foundation</i>	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	-	Indikator Sosial Ekonomi Dalam Pengelolaan Perikanan Rajungan Yang Berkelanjutan	2026
3	<i>Food and Agriculture Organization of the United Nations</i>	<i>Letter Of Agreement (LOA)</i>	TF.FAINS.T5G1100171 93	<i>Impact Assessment of Livelihood, Gender, and Socio-Ecological Five Districts to Monitor the Inland Aquatic Ecosystem in Indonesia</i>	2024

Berdasarkan pada tabel diatas, adapun tindak lanjut atas bentuk kerjasama antara BBRSEKP dengan Mitra Kerjasama diantaranya:

1. Kerjasama antara BBRSEKP dengan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Brawijaya pada tahun 2024 dengan judul kegiatan pengembangan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan adalah melalui kegiatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan tujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai pengetahuan dan keterampilan praktis sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), sesuai dengan surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya Nomor: 529/UN.10.F06/PP/2024 tentang Pengajuan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya tanggal 23 Januari 2024.
2. Kerjasama antara BBRSEKP dengan *Sustainable Fisheries Partnership Foundation* pada tahun 2024 dengan judul Indikator Sosial Ekonomi Dalam Pengelolaan Perikanan Rajungan Yang Berkelanjutan adalah dengan mengimplementasikan keterlibatan BBRSEKP sebagai PIC dalam pencapaian output Indikator Sosial Ekonomi sebagai masukan untuk *Penyusunan Harvest Control Rule (HCR) Perikanan Rajungan di WPP 712* sesuai dengan lampiran II pada Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dan *Sustainable Fisheries Partnership Foundation* yang ditandatangani pada 16 Februari 2023 di Jakarta.

3. Kerjasama antara BBRSEKP dengan *Food and Agriculture Organization of the United Nations* pada tahun 2023 dengan judul *Impact Assessment of Livelihood, Gender, and Socio-Ecological Five Districts to Monitor the Inland Aquatic Ecosystem in Indonesia* adalah mengimplementasikan keterlibatan BBRSEKP sebagai support project pada kegiatan *Project IFish* yang berjudul “*Impact Assessment of Livelihood, Gender, and Socio -Ecological Five Districts to Monitor the Inland Aquatic Ecosystem In Indonesia*” sesuai dengan lampiran III halaman 32 pada dokumen *Letter Of Agreement* yang di tandatangi pada tanggal 19 Oktober 2023 antara Koperasi Artha Mina sebagai penyedia jasa yang di tunjuk BBRSEKP sebagai pengelolaan anggaran kegiatan *Project IFish* dengan *FAO Representative for Indonesia*.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 untuk IK ini mengalami penurunan capaian sebesar 25%, hal ini dikarenakan terdapat 1 PKS yang sudah melewati masa berlaku kerjasamanya, jika dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan untuk IK ini terjadi penurunan karena adanya perubahan nomenklatur dimana tusi kegiatan riset sudah tidak ada, sedangkan perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra 2024 sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan satker sejenis di Lingkungan BPPSDMKP, antara BBRSEKP dengan Pusluh, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 20. Perbandingan Capaian IK 6 dengan satker sejenis

No	Satuan Kerja	Target 2024	Capaian 2024	Persentase
1	BBRSEKP – BPPSDMKP	3	3	100
2	PUSLUHKP – BPPSDMKP	13	17	120

Capaian IK Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket) telah tercapai namun untuk Pusluh belum ada capaian lebih tinggi dengan persentase 120%.

Penyebab keberhasilan IK ini dikarenakan:

1. Adanya regulasi dan pedoman yang jelas tentang tata cara kerjasama antar BBRSEKP dengan Stakeholder;
2. Adanya kesamaan tusi antar BBRSEKP dengan stakeholder atau pemangku kepentingan serta;
3. Adanya kesamaan pelaksanaan kegiatan antar BBRSEKP dengan stakeholder atau pemangku kepentingan serta.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan IK adalah sebagai berikut:

1. Intervensi kegiatan dalam rangka percepatan kegiatan Kapasitas Sumber Daya, Publikasi dan Diseminasi Hasil Kegiatan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan;
2. Kegiatan yang terjadwal dan efektif kepada Stakeholder;

3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder atau pemangku kepentingan dalam rangka percepatan perikanan rajungan berkelanjutan;
4. kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*, *Mini Workshop* maupun *Webinar* dengan melibatkan perguruan tinggi maupun *NGO* dengan tujuan untuk menjalin dan menjangkau kerjasama antar lembaga kementerian ataupun Lembaga riset non kementerian lainnya dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan teknis itu sendiri dan sebagai *recognized Kelembagaan*.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Pelayanan Kerja Sama Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp79.535.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp78.958.503, jika dibandingkan dengan persentase kinerja IK dengan capaian sebesar 100% maka terdapat efisiensi sebesar 0,72% maka kegiatan dapat dikatakan belum cukup efisien.



Ket : Rapat Pembahasan Kerja Sama antara BBRSEKP dengan *Sustainable Fisheries Partnership*



Ket : Rapat pembahasan Inisiasi Kerja Sama antara BBRSEKP dengan *Food and Agriculture Organization of the United Nations*

Gambar 12. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 6

Indikator Kinerja 7.

Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%)

IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%) ini didefinisikan sebagai bagaimana pengetahuan dapat di sampaikan atau disebarkan dalam suatu media. Ruang lingkup manajemen pengetahuan di Tahun 2019 diterjemahkan sebagai tingkat penerapan MP di Level 1 KKP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (ii) kelKtsertaan , (iii) keaktifan Pejabat/staf unit kerja level 1 dalam Sistem Informasi MP yang terpilih.

Pada Tahun 2024 IK manajemen pengetahuan yang terstandar KKP terjadi perubahan, dimana aplikasi pendukung manajemen pengetahuan sebelumnya menggunakan Bitrix24.com kini menjadi Collaboration Office dengan tautan <https://portal.kkp.go.id>. Berdasarkan nota

dinas Plt. Kepala Pusdatin Nomor 2659/SJ.7/TU.210/IX/2024 perihal Implementasi Portal Collaboration Office Tahun 2024 dan Penyampaian perubahan Manual IK Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup KKP.

Tabel 21. Perubahan pengukuran indikator MP

Sebelum	Sesudah
Komponen penilaian: dokumen (20%) dan keaktifan (80%)	Komponen penilaian: keaktifan (100%)
Aplikasi Bitrix24	Aplikasi Collaboration Office
Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 3	Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4
Pegawai yang wajib dinilai: Eselon 2, Koordinator, dan Subkoordinator lingkup pusat	Pegawai yang wajib dinilai: Eselon 2 dan Ketua Tim Kerja

Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%) sebagai berikut:

Tabel 22. Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%)

IK-7. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%)											
Realisasi Tahunan				2024						Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW IV	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024	
100	100	100	116,58	94	94	133.33	120.00	14.37	90	120	
Persentase Capaian Tahunan				Persentase Capaian				Kenaikan/Penurunan Capaian 2023-2024	Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)		
120	119,05	116,28	120	100	120		-	100	120		

Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%) pada tahun 2024 mencapai 133.33% (120%) dari target 94. Capaian sesuai dengan Surat Sekretaris Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor B. 123/BPPSDM.1/TU.210/II/2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang Capaian Nilai IK MP yang Terstandar Lingkup BPPSDM TW IV 2024, data dukung capaian juga dapat diakses di tautan https://bit.ly/DadukIK_MPBBRSEKP2024

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, IK ini terjadi peningkatan capaian sebesar 14,37%, jika dibandingkan dengan capaian kinerja 5 tahunan, untuk IK ini cukup stabil, sedangkan perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra 2024 capaian sudah melebihi dari target renstra sebesar 20%.

Jika dibandingkan dengan satker sejenis di Lingkungan BPPSDMKP, antara BBRSEKP dengan BBRP2BKP, maka capaian pada BBRSEKP tidak lebih besar maupun kurang dari, karena capaian IK sama yaitu 133.33%, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 23. Perbandingan Capaian IK 7 dengan Satker BBRP2BKP

Nama Satker	Capaian Keaktifan		
	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian Tahun 2024
BBRSEKP	94	133.33	120
BBRP2BKP	94	133.33	120

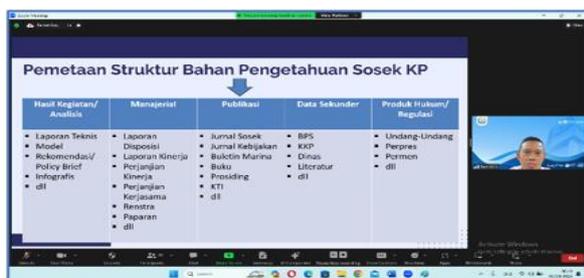
Keberhasilan pencapaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%) disebabkan antara lain:

1. Adanya peran dan partisipasi aktif pengguna di BBRSEKP dalam menyiapkan serta melakukan posting keaktifan pada aplikasi Coofis baik berupa kegiatan ataupun informasi lainnya;
2. Pimpinan BBRSEKP telah memberikan kontribusi pengetahuan berupa informasi dengan ketentuan 5W+1H, *infografis* dan video;
3. Kemudahan dalam mengakses Portal KKP

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain:

1. Mengakses dan mengunggah kegiatan kedalam aplikasi *Collaboration Office*;
2. MengIKti sosialisasi dan monitoring tentang tatacara penginputan pada aplikasi *Collaboration Office*;
3. Berkoordinasi dengan komunikasi langsung sebelum masa waktu triwulanan berakhir.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Data dan Sistem Informasi Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp39.673.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp39.643.900, jika dibandingkan dengan persentase kinerja IK dengan capaian sebesar 120% maka terdapat efisiensi sebesar 20,07% maka kegiatan dapat dikatakan cukup efisien.



Ket : Sosialisasi Manajemen Pengetahuan Internal



Ket : Forum Pemetaan Koordinasi Kolaborasi Pemetaan Lingkup KKP

Gambar 13. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 7

Indikator Kinerja 8.

Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP (Inovasi)

IK Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP (Inovasi) merupakan terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%) sebagai berikut:

Tabel 24. Capaian IK Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP (Inovasi)

IK-8. Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP (Inovasi)											
Realisasi Tahunan				2024					Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)		
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW IV	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024	
-	-	1	1	1	1	100	100.00	-	1	100	
Persentase Capaian Tahunan				Persentase Capaian				Kenaikan/Penurunan Capaian 2023-2024	Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)		
-	-	100	100	100	100		-	100	100		

Capaian IK Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP (Inovasi) pada tahun 2024 mencapai 1 inovasi atau sama dengan 100 dari target 1 inovasi. Capaian sesuai dengan memo penanggungjawab IK Nomor Nomor : 5 /BBRSEKP/TU.210/II/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Penyampaian Hasil Capaian IK Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP (Inovasi), data dukung capaian juga dapat diakses di tautan https://bit.ly/DadukInovasi_Yanblik2024

Jika dibandingkan dengan tahun 2023 untuk IK ini tidak terjadi kenaikan maupun penurunan capaian atau sama dengan 100%, sedangkan jika dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan, untuk IK ini tidak dapat dibandingkan, karena IK baru di bentuk di tahun 2022, sedangkan perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra 2024 sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan satker sejenis di lingkungan BPPSDMKP untuk IK ini tidak dapat dibandingkan, karena IK dibentuk untuk mengakomodir fungsional pranata komunikasi.

Penyebab keberhasilan IK ini dikarenakan:

1. Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui inovasi dan peningkatan kualitas layanan;
2. Adanya pelayanan publik yang terlaksana di BBRSEKP;
3. Kemudahan pengguna layanan dalam mendapatkan informasi dan mengelola naskah yang diindikasikan dengan peningkatan kualitas pelayanan ditunjukkan dengan skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
4. Kemudahan penulis saat mensubmit, mendapatkan informasi, serta pemantauan perkembangan naskah lebih detail melalui OJS.

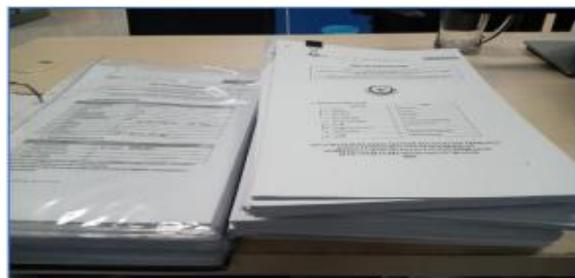
Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain:

1. Mengikuti workshop pelayanan publik yang menjadi media diskusi dan evaluasi terkait pelayanan publik di lingkup BPPSDMKP dengan narasumber dari pihak koordinator pelayanan publik KKP maupun stakeholder KKP;
2. Mengakses dan mengupload kegiatan kedalam aplikasi sikepo;
3. Mengikuti sosialisasi dan monitoring tentang tatacara membuat Video Tutorial Submit, Video Formatting Naskah, Template Naskah Menggunakan *Style Paragraph*, *Icon Chat Whatsapp*, Mesin Penjawab/*Chatbot Telegram*, dan Aplikasi status naskah;
4. Berkoordinasi dengan komunikasi langsung dengan Set BPPSDMKP.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp12.600.000, jika dibandingkan dengan persentase kinerja IK dengan capaian sebesar 100% maka terdapat efisiensi sebesar 0,00% maka kegiatan belum cukup efisien.



Ket : Workshop Perangkat Teknologi



Ket : Dokumen Pengajuan proposal inovasi

Gambar 14. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 8

Indikator Kinerja 9.

Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai)

IK Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Capaian IK Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai) sebagai berikut :

Tabel 25. Capaian IK 9 Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai)

IK-9. Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai)											
Realisasi Tahun				2024					Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)		
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW IV	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	% Penurunan Capaian Tahun 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024	
-	-	-	95,40	86,50	86,50	92,00	114,38	3,56	88	104,54	
Persentase Capaian Tahun				Persentase Capaian				Kenaikan/Penurunan Capaian Tahun 2023-2024		Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
-	-	-	110,93	100	106,36		4,12		100	14,38	

Capaian IK 9 Pada Tahun 2024 capaian telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu dengan target senilai 86,50 dan capaian senilai 92,00 atau sama dengan 106,36%. Capaian sesuai dengan screenshot aplikasi Susan KKP. Capaian IK sesuai memo penanggungjawab IK nomor 5 /BBRSEKP/TU.210/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang penyampaian Hasil Capaian IK Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP (Inovasi), data dukung capaian juga dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/DadukIK_PersepsiKepuasanYanblik

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, untuk IK mengalami penurunan capaian sebesar 3,56% hal ini dikarenakan permasalahan teknis pada server yang mendukung operasional OJS, jika dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan, IK ini tidak dapat dibandingkan karena IK baru dibentuk di tahun 2023 untuk mengakomodir fungsional pranata komputer di BBRSEKP, sedangkan perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra 2024 sudah melebihi dari target renstra sebesar 4,54%.

Jika dibandingkan dengan K/L lainnya seperti pada Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama maka capaian BBRSEKP lebih tinggi sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 26. Perbandingan Kepuasan Layanan Publik dengan Pusdiklat TA Kemenag

Nama Satker	Capaian Per Dimensi			
	Target	Realisasi	Nilai Akhir	% Capaian
BBRSEKP	86,50	92,00	92,00	106,36
Pusdiklat TA - Kemenag	77	88,40	88,40	114,81

Sebagaimana pada tabel diatas dapat dijabarkan jika pencapaian nilai kepuasan layanan publik antara BBRSEKP dengan Pusdiklat Tenaga Administrasi – Kementerian Agama lebih tinggi, hal ini dikarena pada BBRSEKP pada website menggunakan 9 idikator meliputi:

1. Persyaratan
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifik Jenis Pelayanan
6. Respon dari Aplikasi
7. Pengguna Fitur Aplikasi
8. Kualitas Isi/Konten
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

dan Pusdiklat TA – Kemenag menggunakan 5 indikator diantaranya:

1. Prosedur Pelayanan
2. Waktu Penyelesaian
3. Produk Layanan
4. Sistem Aplikasi Pelayanan
5. Kompetensi Pemberi Layanan

Indikator tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sesuai dengan peraturan unsur indikator dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.

Keberhasilan Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai) disebabkan antara lain adanya *software* layanan tentang aplikasi Susan, adanya kemudahan penilaian survey kepuasan masyarakat (SKM), serta adanya kemudahan akses kedalam aplikasi Susan.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain membuat survey kepuasan masyarakat (SKM), mengolah data hasil penilaian survey, pelayanan yang baik dari tim pelayanan publik di BBRSEKP terhadap pengunjung serta adanya petugas kompten yang telah dibekali bimtek layanan prima.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Penyusunan Perencanaan Penganggaran Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp12.202.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp12.156.400, jika dibandingkan dengan persentase kinerja IK dengan capaian sebesar 106,36% maka terdapat efisiensi sebesar 6,36% maka kegiatan berjalan cukup efisien.



Ket : Rapat internal pembahasan jurnal BBRSEKP Tahun 2024



Ket : Rapat pembahasan survey kepuasan masyarakat (SKM)

Gambar 15. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 9

Indikator Kinerja 10.

Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)

Nilai IKPA BBRSEKP merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Penyerapan Anggaran (bobot 20%), Pengelolaan Uang Persediaan (10%) Penyelesaian Tagihan (20%) Deviasi Halaman III DIPA (11), Penyampaian Data Kontrak, Penyampaian LPJ Bendahara, Revisi DIPA, Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi SPM, Renkas/RPD Harian, Retur SP2D (masing masing 5%). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Capaian kinerja IK Nilai IKPA BBRSEKP adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Capaian IK 10 Nilai IKPA BBRSEKP

IK-10. Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)										
Realisasi Tahun				2024					Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW IV	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	% Kenaikan Capaian Tahun 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
77,75	96,85	96,83	95,89	93,76	93,76	99,29	105,90	3,55	≤90	110,32
Persentase Capaian Tahun				Persentase Capaian				Kenaikan/Penurunan Capaian Tahun 2023-2024	Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
88,35	108,82	108,80	102,28	100	105,90		3,54	100	5,90	

Capaian Nilai IKPA BBRSEKP tahun 2024 sebesar 99,29 atau 105,90% dari target 93,76. Capaian ini sesuai dengan Nota Dinas penyampaian IKPA dari Biro Keuangan Nomor: 196/SJ.2/RC.610/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang capaian indikator kinerja IKPA dilingkungan KKP, Capaian IK juga dapat diakses melalui tautan tautan https://bit.ly/DadukIKPA_BBRSEKP2024

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terjadi peningkatan capaian sebesar 3,55%, jika dibandingkan dengan capaian kinerja 5 tahunan, untuk IK ini cukup stabil sedangkan perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra 2024 sudah melebihi dari target sebesar 10,32%. Secara umum, kinerja masih perlu ditingkatkan terutama pada indikator deviasi halaman III DIPA.

Jika dibandingkan dengan satker sejenis di K/L lain, antara BBRSEKP dengan Balai Besar Pelatihan Pertanian BBPP Lembang, Kementerian Pertanian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 28. Perbandingan Capaian IKPA dengan BBPPL

Nama Satker	Capaian Per Komponen Nilai IKPA			
	Target	Realisasi	Nilai Akhir	% Capaian
BBRSEKP	93,76	99,29	99,29	105,90
BBPPL - Kementan	90	96,54	96,54	107,27

Keberhasilan atas pencapaian IK ini ditunjang oleh pemahaman yang cukup baik dari BBRSEKP terhadap komponen dan indikator penilaian IKPA serta adanya disiplin dalam pelaksanaan anggaran di BBRSEKP.

Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan nilai IKPA ke depan antara lain:

1. Pengelola keuangan agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat;
2. Penanggungjawab pengelola barang dan jasa agar selalu meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya oleh KPPN;
3. Pengelola keuangan agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM;
4. Teliti dalam memproses dokumen pembayaran, jika terdapat retur SP2D berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaian maks 7 hari kerja;
5. Perencana dan pengelola keuangan agar selektif dalam revisi DIPA kategori pagu tetap, batasan frekuensi revisi 1x setiap triwulan;
6. Disiplin menyampaikan LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan memastikan data LPJ telah di-approve KPPN pada aplikasi SPRINT;
7. Disiplin dalam penyampaian Renkas (RPD harian) sebelum mengajukan pencairan dana kategori besar;
8. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun;

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain input capaian output pada aplikasi omspan, penyusunan dokumen penyelesaian SPM secara tepat waktu, berkoordinasi dengan biro keuangan terkait nilai IKPA terhadap realisasi halaman III DIPA, serta penyelesaian tagihan sesuai dengan tidak melebihi batas yang ditentukan.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Pelayanan Keuangan dan Perbendaharaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp75.163.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp75.156.400, jika dibandingkan dengan persentase capaian sesuai kinerja IK sebesar 105,90% maka terdapat efiseinsi sebesar 5,95 atau sama dengan kegiatan berjalan cukup efisien.



Ket : Bimtek Pengisian Capaian Output



Ket : Koordinasi Optimalisasi Nilai IKPA ke KPPN Jakarta

Gambar 16. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 10

Indikator Kinerja 11.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)

IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP adalah:

- Nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan, anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran;
- Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/ Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi Monev Kemenkeu. Berdasarkan KMK 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektifitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiao indikator dengan bobot pada masing-masing indikator

Capaian Nilai Kinerja Anggaran BBRSEKP (Nilai) sebagai berikut:

Tabel 29. Capaian IK 11 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)

IK-11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)										
Realisasi Tahun				2024					Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW IV	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	% Kenaikan Capaian Tahun 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	-	-	71	71	100	120	-	71	120
Persentase Capaian Tahun				Persentase Capaian				Kenaikan/Penurunan Capaian Tahun 2023-2024	Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
-	-	-	-	100	120		-	100	120	

Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai) sebesar 100 dari target 71 atau sama dengan 120%, berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Jendral Nomor: 182/SJ.2/TU.210/II/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA. 2024, capaian IK juga dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/DadukNKPA_BBRSEKP2024

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 serta kinerja 5 tahunan, untuk IK ini tidak dapat dibandingkan karena IK baru dibentuk di TW IV tahun 2024 sebagai pengganti IK Nilai Kerja Anggaran sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 466 tahun 2023 tentang Pedoman

Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, sedangkan perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra 2024 capaian IK sudah melebihi target renstra sebesar 20%.

Jika dibandingkan dengan satker sejenis di Kementerian lainnya seperti antara BBRSEKP dengan Pusat Penyuluhan Dan Pengembangan SDM, KLHK , sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 30. Perbandingan Capaian IK 11 dengan satker PPPSDM, KLHK

Nama Satker	Capaian Per Komponen Nilai Kinerja Anggaran			
	Target	Realisasi	%	Efisiensi SBK
BBRSEKP	71	100	120	Baik
PPPSDM-KLHK	82,5	98,84	119,81	Baik

Keberhasilan atas pencapaian IK ini ditunjang oleh pemahaman yang cukup baik dari operator dan pengelola keuangan di BBRSEKP terhadap komponen dan indikator dari penilaian NKPA serta disiplin dalam pelaksanaan anggaran. Upayan-upaya yang dilakukan dalam pencapaian antara lain:

1. Output kegiatan diwujudkan sesuai perencanaan;
2. Pembentukan dan pendampingan tim aplikasi SAKTI di Lingkungan BPPSDMKP;
3. Pemantauan Pemantauan secara berkala terhadap capaian nilai NKPA, melalui input capaian dan komponen pada aplikasi SAKTI yang menjadi penilaian pada aplikasi Smart DJA.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain input capaian ouput pada aplikasi omspan yang terintegrasi dengan smart dja, penginputan capaian output secara tepat waktu, berkoordinasi dengan biro keuangan terkait nilai penilaian efisiensi, mengIKti rekonsiliasi aplikasi lingkup BPPSDMKP serta monitoring dan evalausi atas pelaksanaan anggaran di BBRSEKP.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp137.937.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp137.104.238 jika dibandingkan dengan persentase capaian sesuai kinerja IK sebesar 120% maka terdapat efiseinsi sebesar 20,60 atau sama dengan kegiatan berjalan efisien.



Ket : Rekonsiliasi internal terkait capaian RO pada aplikasi SAKTI



Ket : Rapat terkait perubahan nilai kinerja anggaran lingkup BPPSDMKP

Gambar 17. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 11

Indikator Kinerja 12.

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai)

IK Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai) merupakan Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja.

Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk Meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, Menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik.

Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Nilai) sebagai berikut:

Tabel 31. Capaian IK 12 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai)

IK-12. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai)										
Realisasi Tahun				2024					Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW IV	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	% Kenaikan Capaian Tahun 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	98,18	98,17	97,22	94	94	98,53	104,82	1,31	93	104,82
Persentase Capaian Tahun				Persentase Capaian				Kenaikan/Penurunan Capaian Tahun 2023-2024	Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
-	112,85	107,38	104,54	100	104,82		0,27	100	4,82	

Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja senilai 98,53 dari target 94 atau sama dengan 104,82%, berdasarkan surat Sekretaris BPPSDMKP Nomor B.7931/BPPSDM.1/TU.210/XI/2024 tanggal 1 November 2024 tentang Capaian Nilai IK (Indikator Kinerja) Rekonsiliasi Kinerja Lingkup BPPSDMKP 2024, capaian IK juga dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/DadukRekon_BBRSEKP2024

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, mengalami kenaikan capaian sebesar 1,31%, jika dibandingkan dengan capaian kinerja 5 tahunan, untuk IK ini cukup stabil sedangkan perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra 2024 telah melebihi target renstra sebesar 4,82%

Jika dibandingkan dengan satker sejenis di Lingkungan BPPSDMKP, antara BBRSEKP dengan BBRP2BKP, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 32. Perbandingan IK 12 dengan satker BBRP2BKP

Nama Satker	Capaian Per Komponen Nilai Rekonsiliasi Kinerja			
	Target	Realisasi	% Capaian	Keterangan
BBRSEKP	94	98,53	104,82	Baik
BBRP2BKP	94	95,92	102,04	Baik

Keberhasilan atas pencapaian IK ini ditunjang oleh pemahaman yang cukup baik dari pelaksana penyusun laporan kinerja, adanya kesesuaian antar dokumen perencanaan, ketepatan waktu dalam penginputan aplikasi kinerjaku, ketepatan dalam menyusun laporan kinerja, menyampaikan laporan kinerja ke atasan serta mengunggah laporan kinerja kedalam aplikasi SAKIP PANRB secara tepat waktu atau tidak melebihi batas yang ditentukan.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain input capaian kinerja kedalam aplikasi kinerjaku secara tepat waktu, menyusun dokumen perencanaan meliputi PK, manual ik, rencana aksi, rincian target IK, menyusun laporan kinerja, validasi dan verifikasi capaian kinerja, serta reuiu kinerja di lingkungan BBRSEKP maupun internal.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp58.616.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp57.292.491 jika dibandingkan dengan persentase capaian sesuai kinerja IK sebesar 104,82% maka terdapat efiseinsi sebesar 7,08 atau sama dengan kegiatan berjalan efisien.



Ket : Rapat persiapan pengukuran capaian kinerja triwulan III lingkup BPPSDMKP tahun 2024



Ket : Verifikasi dan validasi capaian kinerja triwulan III lingkup BPPSDMKP tahun 2024

Gambar 18. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 12

Indikator Kinerja 13.

Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)

IK Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai) merupakan Nilai Penilaian Mandiri yang dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BBRSEKP.

Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/ daerah. Penilaian SAKIP di lingkup KKP sampai dengan tahun 2021, dilakukan berdasarkan Permen PAN RB 12 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pada tahun 2024 penilaian SAKIP menggunakan peraturan baru dengan terbitnya Permen PAN RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan mendasar dalam penilaian SAKIP yaitu adanya penggabungan dan pembobotan dalam komponen penilaian, keselarasan cascading untuk melihat keselarasan kinerja organisasi, sistem reward and punishment, penambahan kriteria penilaian dari 5 menjadi 8 kriteria, serta orientasi penilaian lebih kearah dampak implementasi SAKIP atau outcome.

Capaian Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai) sebagai berikut

Tabel 33. Capaian IK 13 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)

IK-13. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)										
Realisasi Tahun				2024					Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW IV	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	% Kenaikan Capaian Tahun 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	-	83	81	81	83,65	103,27	0,78	81	103,27
Persentase Capaian Tahun				Persentase Capaian				Kenaikan/Penurunan Capaian Tahun 2023-2024	Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
-	-	-	103,11	100	103,27		0,16	100	103,27	

Capaian Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai) senilai 83,65 dari target 81 atau sama dengan 103,27%, berdasarkan surat Sekretaris BPPSDMKP Nomor B.4841/BPPSDM.1/RC.610/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Hasil Penilaian Mandiri

SAKIP Level 2 BPPSDM, capaian IK juga dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/DadukPMSAKIP_BBRSEKP2024

Indikator ini, jika dibandingkan dengan tahun lalu terdapat peningkatan capaian sebesar 0,78% namun, untuk dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan IK ini tidak dapat dibandingkan, karena IK ini baru di bentuk di tahun 2023 untuk mengakomodir kegiatan pada BBRSEKP Penyusunan Pelaporan Kinerja Satker pada BBRSEKP di tahun 2023 meskipun pada kenyataannya penilaian SAKIP tetap di lakukan di tahun-tahun sebelumnya namun IK tersebut hanya berhenti di level I, sedangkan jika dibandingkan terhadap target jangka menengah untuk ik ini sudah melebihi target sebesar 3,27%.

Jika dibandingkan dengan satker sejenis di Kementerian Lainnya, antara BBRSEKP dengan Pusat Penyuluhan Dan Pengembangan SDM, KLHK sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 34. Perbandingan Capaian IK 13 dengan satker PPPSDM - KLHK

No	Satuan Kerja	Target 2024	Capaian 2024	Persentase
1	BBRSEKP – BPPSDMKP	81	83,65	103,27
2	PPPSDM – KLHK	80	80,11	100,14

Capaian IK peningkatan kapasitas PM SAKIP BBRSEKP dengan Pusluh KLHK, dari sisi capaian BBRSEKP lebih tinggi dibandingkan Pusluh KLHK meski memiliki target yang lebih besar.

Keberhasilan atas pencapaian IK ini antara lain:

1. Tersedianya data dukung sampai dengan 5 tahun;
2. Tersedianya data dukung SKP seluruh pegawai BBRSEKP selama 5 tahun;
3. Adanya upaya baru berupa dilaksanakannya reuiu LKj pada lingkup BPPSDMKP;
4. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, terdapat inovasi berupa aplikasi Sistem Manajemen Pengetahuan atau KMS di BBRSEKP

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain input lembar LKE pada aplikasi penilaian mandiri SAKIP, menyusun dokumen evaluasi rencana aksi, penilaian uji petik SAKIP oleh Inspektorat Jenderal KKP yang dilakukan pada 4 satker lingkup BPPSDMKP, serta berkoordinasi secara intensive dengan Koordinator Monev di BPPSDMKP.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Penyusunan Pelaporan Kinerja Satker” dengan pagu anggaran sebesar Rp29.024.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp29.009.637 jika dibandingkan dengan persentase

capaian sesuai kinerja IK sebesar 103,27% maka terdapat efiseinsi sebesar 3,32 atau sama dengan kegiatan berjalan efisien.



Ket : Penyusunan tindak lanjut hasil catatan reviu penilaian SAKIP uji petik tahun 2024



Ket : Benchmarking Kinerja BPPSDM KKP dengan BPPSDM KLHK 2024

Gambar 19. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 13

Indikator Kinerja 14.

Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)

IK Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%) merupakan laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasi diakhir periode.

Capaian IK Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%) sebagai berikut :

Tabel 35. Capaian IK 14 Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)

IK-14. Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)										
Realisasi Tahunan				2024					Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	-	98,24	98	98	99,86	101,90	1,65	98	101,90
Persentase Capaian Tahunan				Persentase Capaian				Kenaikan/Penurunan Capaian Tahun 2023-2024	Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
-	-	-	100,24	100	101,90		1,01	100	101,90	

Capaian IK Pada Tahun 2024 capaian sebesar 99,86 dari target yang telah di tetapkan yaitu dengan target 98 atau sama dengan 101.90%, Capaian sesuai dengan surat penanggungjawab IK BBRSEKP nomor B. 2649/BBRSEKP/TU.210/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Capaian IK “Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)” TW IV Tahun 2024, data dukung capaian IK juga dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/DadukIK_RABBRSEKP2024

Indikator ini, tidak dapat dibandingkan baik dengan tahun sebelumnya, dengan kinerja 5 tahunan maupun dengan target jangka menengah, karena IK ini baru di bentuk di tahun 2023 untuk mengakomodir kegiatan pada BBRSEKP terkait Kegiatan Gaji dan Tunjangan pada BBRSEKP di tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan satker sejenis di Lingkungan BPPSDMKP, antara BBRSEKP dengan BBRP2BKP untuk IK ini tidak dapat dibandingkan karena keberadaan IK untuk mengakomodir Fungsional di BBRSEKP.

Keberhasilan capaian indikator ini antara lain adanya komunikasi yang terjalin dengan baik antara pengelola keuangan dengan penanggungjawab kegiatan, komunikasi yang terjalin dengan baik antara BBRSEKP dengan mitra KPPN VI Jakarta, penyelesaian SPM secara tepat waktu sesuai dengan jadwal, pembayaran gaji dan tunjangan secara tepat waktu, dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana operasional kegiatan.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain rapat internal pengawalan rencana penarikan dana, monitoring dan evakuasi kegiatan secara berkala, berkoordinasi dengan mitra KPPN Jakarta VI.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Gaji dan Tunjangan” dengan pagu anggaran sebesar Rp7.135.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.133.212.555 jika dibandingkan dengan persentase capaian sesuai kinerja IK sebesar 101,90% maka terdapat efiseinsi sebesar 1,93 atau sama dengan kegiatan berjalan efisien.



Ket : Rapat terkait persiapan langkah-langkah akhir tahun oleh KPPN Jakarta



Ket : Sosialisasi Pembiayaan Anggaran melalui aplikasi oleh KPPN Jakarta

Gambar 20. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 14

Indikator Kinerja 15. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BBRSEKP(%)

IK Batas Tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BBRSEKP(%) merupakan Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK BRSDM merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang

didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Indikator batas tertinggi persentase temuan LHP BPK atas laporan keuangan (LK) BBRSEKP dibandingkan realisasi anggaran sesuai dengan yang ditetapkan biro keuangan KKP.

Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/ daerah. Penilaian SAKIP di lingkup KKP sampai dengan tahun 2021, dilakukan berdasarkan Permen PAN RB 12 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pada tahun 2024 penilaian SAKIP menggunakan peraturan baru dengan terbitnya Permen PAN RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan mendasar dalam penilaian SAKIP yaitu adanya penggabungan dan pembobotan dalam komponen penilaian, keselarasan cascading untuk melihat keselarasan kinerja organisasi, sistem reward and punishment, penambahan kriteria penilaian dari 5 menjadi 8 kriteria, serta orientasi penilaian lebih kearah dampak implementasi SAKIP atau outcome.

Capaian IK Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%) sebagai berikut :

Tabel 36. Capaian IK 15 Batas Tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BBRSEKP (%)

IK-15. Batas Tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BBRSEKP (%)										
Realisasi Tahunan				2024					Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV	% Capaian	% penurunan Tahun 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0,01	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,10	120	20	0,00	120
Persentase Capaian Tahunan				Persentase Capaian				Kenaikan/Penurunan Capaian Tahun 2023-2024	Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
120	100	120	120	100	120		-	100	120	

Capaian IK Pada Tahun 2024 capaian sebesar 0,10 dari target yang telah di tetapkan yaitu dengan target kurang dari 0,50 atau sama dengan 120%, Capaian sesuai dengan surat Sekretaris BPPSDMKP nomor B.7568/BPPSDM.1/HP.510/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Capaian IK “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk

Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”, data dukung capaian IK juga dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/DadukIK_LHPBPKBBRSEKP2024

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, untuk IK ini mengalami penurunan capaian sebesar 20% hal ini dikarenakan terdapat temuan selisih pembayaran tunjangan kinerja 2 pegawai BBRSEKP, jika dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan IK ini cukup stabil, perbandingan terhadap target Renstra telah mencapai sudah tercapai bahkan melebihi target sebesar 20% .

Jika dibandingkan dengan satker sejenis di Lingkungan BPPSDMKP, antara BBRSEKP dengan BBRP2BKP, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 37. Perbandingan Capaian IK 15 dengan satker BBRP2BKP

Capaian IK Batas Tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BBRSEKP (%)			
Satker	Target	Realisasi	Persentase
BBRSEKP	0.50	0.10	120%
BBRP2BKP	0.50	0.00	120%

Keberhasilan atas pencapaian IK ini antara lain BBRSEKP mampu mengawal pelaksanaan kegiatan meskipun terdapat temuan yang bersumber dari kelebihan pembayaran tunjangan pegawai di tahun 2024, serta BBRSEKP dapat menindaklanjuti hasil temuan dengan tepat waktu dan terus berkoordinasi dengan Biro Keuangan serta internal.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain penyusunan laporan keuangan, update rekening (saldo dan rekening koran) serta rapat internal terkait pelaporan keuangan BBRSEKP.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah” dengan pagu anggaran sebesar Rp10.530.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.530.000 jika dibandingkan dengan persentase capaian sesuai kinerja IK sebesar 120% maka terdapat efiseinsi sebesar 20 atau sama dengan kegiatan berjalan efisien.



Ket : Rapat pembahasan hasil temuan sementara BPK atas LK satker lingkup BPPSDMKP



Ket : Workshop penyusunan laporan keuangan lingkup BPPSDMKP tahun 2024

Gambar 15. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 15

Indikator Kinerja 16.

Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-akreditasi (Indeks Jurnal)

IK Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-akreditasi (Indeks Jurnal) merupakan sarana di berbagai forum dan media untuk mempublikasikan teks artikel ilmiah baik teks artikel konseptual, artikel penelitian dan artikel ilmiah populer, diantaranya yaitu Jurnal ilmiah, bulletin dan prosiding.

Berdasarkan Permen Ristek Dikti No.6/2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah dijelaskan bahwa jurnal dikatakan terakreditasi apabila proses akreditasi jurnal ilmiah dilakukan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kata lain, jurnal yang diterbitkan memiliki E-ISSN dan pengenal objek digital (Digital Object Identifier/DOI) agar dapat ditelusuri, secara transparan dapat diperiksa terutama terkait dengan plagiarisme atau agar tidak terjadi tumpang tindih pengembangan keilmuan, dan meningkatkan daya baca (disitasi). Akreditasi jurnal ilmiah berlaku untuk masa 5 (lima) tahun

Capaian IK Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-akreditasi (Indeks Jurnal) sebagai berikut :

Tabel 38. Capaian IK 16 Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-akreditasi (Indeks Jurnal)

IK-16. Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-akreditasi (Indeks Jurnal)											
Realisasi Tahunan				2024					Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)		
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV	% Capaian	% Kenaikan/ penurunan Tahun 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024	
-	-	-	1	1	1	1	100	-	1	100	
Persentase Capaian Tahunan				Persentase Capaian				Kenaikan/Penurunan Capaian Tahun 2023-2024	Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)		
-	-	-	100	100	100		-	100	100		

Capaian IK Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-akreditasi (Indeks Jurnal) pada tahun 2023 mencapai target sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan target 1 dan capaian 1 atau sama dengan 100%. Capaian ini sesuai dengan surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset Dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 0187/E5.3/HM.01.00/2023 tanggal 12 Maret 2023 terkait Pemberitahuan Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah.

Indikator ini, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk indikator ini tidak terjadi peningkatan maupun penurunan capaian atau sama dengan 100% namun, apabila dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan maupun dengan target jangka menengah untuk IK ini tidak dapat dibandingkan karena IK ini baru dibentuk di tahun 2023 untuk mengakomodir

kegiatan pada BBRSEKP terkait Pelayanan Data Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan pada BBRSEKP ditahun 2023 sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk IK ini sudah tercapai 100%.

Jika dibandingkan dengan satker sejenis di K/L lainnya, antara BBRSEKP dengan Universitas Halu Oleo, sebagaimana pada tabel berikut:

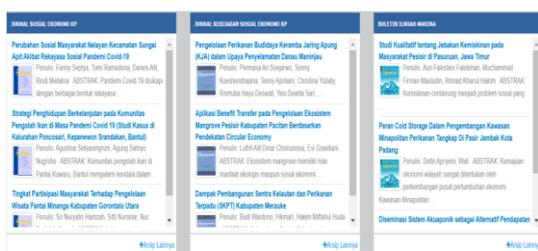
Tabel 39. Perbandingan Capaian IK 16 dengan Universitas Halu Oleo

Capaian IK Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-reakreditasi (Indeks Jurnal)			
Satker	Target	Realisasi	Persentase
BBRSEKP	1	1	100%
Universitas Halu Oleo	1	1	100%

Keberhasilan atas pencapaian IK ini antara lain tersusunnya usulan akreditasi susulan, dan terbitnya sertifikat akreditasi dan peringkat pengelolaan jurnal.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan untuk pembahasan terkait dengan pengusulan, menyusun dokumen usulan pengelolaan dan penilaian ulang jurnal sosial ekonomi.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Pelayanan Data Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp92.467.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp91.839.550 jika dibandingkan dengan persentase capaian sesuai kinerja IK sebesar 100% maka terdapat efiseinsi sebesar 0,68 atau sama dengan kegiatan berjalan efisien.



Ket : Widget jurnal ilmiah BBRSEKP



Ket : Rapat pembahasan terkait jejaring Section Editor dan Reviewer untuk Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Gambar 22. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 16

Indikator Kinerja 17.

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)

IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) merupakan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober s.d 30 September atau Triwulan IV s.d Triwulan III yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindaklanjut lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan.

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti oleh BBRSEKP secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS) sebanyak 80% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) sebagai berikut:

Tabel 40. Capaian IK 17 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)

IK-17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)										
Realisasi Tahunan				2024					Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW IV	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	% Kenaikan Capaian 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
100.00	100.00	100.00	80.00	82	82	100	120.00	25	82	120
Persentase Capaian Tahunan				Persentase Capaian				Kenaikan/Penurunan Capaian Tahun 2023-2024	Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
100.00	120	120.00	100.00	100	120		20.00	100	120	

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) pada tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan pada rencana aksi, dengan target 82 dan capaian 100 atau sama dengan 120%. Capaian sesuai dengan surat Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: B.7568/BPPSDM.1/HP.510/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang penyampaian capaian Capaian IK “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”, data dukung capaian ik juga dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/DadukIK_RekomPengawasan2024

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terjadi kenaikan capaian sebesar 25%, jika dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan untuk IK ini cukup stabil, jika dibandingkan dengan target Reviu Renstra Tahun 2024 capaian sudah melebihi dari target sebesar 20%.

Gambar 23. Data Rekapitulasi Capaian IK 16 sesuai surat BPPSDMKP Nomor B.7568/BPPSDM.1/HP.510/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024

Lampiran 2 Surat
 Nomor : B.7568/BPPSDM.1/HP.510/X/2024
 Tanggal : 14 Oktober 2024

**Data Rekapitulasi Capaian IKU
 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPPSDM
 Triwulan III Tahun 2024**

No	Satker Pusat	Temuan Awal (Saran)	Tindak Lanjut (Saran)	%
1	Sekretariat BRSDM	70	61	87,14
2	Pusat Pendidikan KP	9	9	100
3	Pusat Pelatihan	0	0	0
4	Pusat Penyuluhan (Pusriskel)	0	0	0
5	BBRP2BKP	2	2	100
6	BBRSEKP	7	7	100

Sumber Data: Surat BPPSDMKP

Jika dibandingkan dengan satker K/L lainnya seperti Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 41. Perbandingan Capaian IK 17 K/L BBRSEKP Dengan Pusdiklat TA Kemenag

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)			
Satker	Target	Realisasi	Persentase
BBRSEKP	82	100	120
Pusdiklat TA- Kemenag	75	57,72	76,96

Keberhasilan atas pencapaian IK ini antara lain telah selesainya 7 temuan atas laporan keuangan pada BBRSEKP dimana sampai dengan akhir tahun telah dinyatakan Tuntas sehingga sudah tidak terdapat temuan pada tahun 2024 serta berkoordinasi secara intens dengan Timja Keuangan Sekretariat BPPSDMKP.

Kegiatan pendukung IK ini antara lain koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP, Biro Keuangan KKP dan Koordinator Keuangan di BPPSDMKP, serta adanya rapat dan pengawasan internal di BBRSEKP.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial "Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan" dengan pagu anggaran sebesar Rp10.690.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.690.000, jika dibandingkan dengan persentase capaian sesuai kinerja IK

sebesar 120% maka terdapat efiseinsi sebesar 20 atau sama dengan kegiatan berjalan cukup efisien.



Ket : Rapat pembahasan hasil pengawasan lingkup BPPSDM



Ket : Rapat pembahasan sisa temuan lingkup BPPSDMKP tahun 2024

Gambar 24. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 17

Indikator Kinerja 18.

Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai)

IK Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai) yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai) merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik.

Capaian IK Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai) pada tahun 2024 mencapai 85,17 dari target 84 atau sama dengan 100%.

Capaian IK Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai) sebagai berikut :

Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) sebagai berikut :

Tabel 42. Capaian IK 18 Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai)

IK-18. Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai)										
Realisasi Tahunan				2024					Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW IV	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	% Kenaikan Capaian 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	-	85,17	85	85	95,40	120,00	12,01	85	120
Persentase Capaian Tahunan				Persentase Capaian				Kenaikan/Penurunan Capaian Tahun 2023-2024	Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
-	-	-	101,39	100	120		18,35	100	20,00	

Capaian IK pada tahun 2024 sudah mencapai target yang telah ditetapkan bahkan lebih dimana dengan target 85 dan capaian sebesar 95,40 atau sama dengan 120%, Capaian sesuai dengan memo penanggungjawab IK Nomor: 6 /BBRSEKP/TU.210/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tertang Penyampaian Hasil Capaian IK Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBMyang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai), capaian IK juga dapat diakses melalui tautan tautan https://bit.ly/DadukIK_WBK2024.

Indikator ini, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka capaian IK meningkat sebanyak 12,01% namun, untuk IK ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja kinerja 5 tahunan karena IK ini baru di bentuk di tahun 2023 untuk mengakomodir kegiatan pada BBRSEKP terkait Pelayanan Kepatuhan Birokrasi Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan pada BBRSEKP di tahun 2023. Sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk IK ini sudah melebihi target 120% dari 100% target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan satker K/L lainnya seperti Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Maluku– Mahkamah Agung, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 43. Perbandingan Capaian IK 18 K/L BBRSEKP Dengan PA Dataran Hunipopu – MA

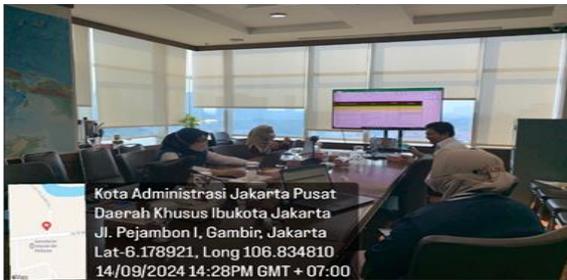
Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)					
Satker	Indikator				
	A. Pengungkit		B. Hasil		Nilai WBK
	I. Pemenuhan	II. Reform	I. Birokrasi	II. Pelayanan Publik	
BBRSEKP	26,26	25,40	28,29	15,44	95,40
PA Dataran Hunipopu - MA	27,32	25,23	20,11	16,32	88,98

Keberhasilan atas pencapaian IK ini antara lain adanya komitmen untuk mempertahankan predikat wbk di BBRSEKP, dan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dokumen perencanaan, terpenuhinya dokumen manajemen perubahan tim, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM dan dokumen penguatan akuntabilitas serta terjalinnya komunikasi yang baik antara BBRSEKP dengan tim penilai WBK di tahun sebelumnya.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain koordinasi dengan Set. BPPSDMKP, adanya rapat dan penilaian tim di internal BBRSEKP.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Pelayanan Kepatuhan Birokrasi Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp48.246.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp44.660.100 jika

dibandingkan dengan persentase capaian sesuai kinerja IK sebesar 112,24% maka terdapat efiseinsi sebesar 19,67 atau sama dengan kegiatan berjalan cukup efisien.



Ket : Rapat Pembahasan Pengisian Kertas Kerja Borang money dengan Sekretariat BPPSDMKP



Ket : Rapat internal monitoring dan evaluasi triwulan III pelaksanaan kegiatan tahun 2024

Gambar 25. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 18

Indikatorl Kinerja 19.

Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%)

IK Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%) merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BBRSEKP diukur berdasarkan (i) Tersedianya dokumen rencana kebutuhan BMN (RKMBN) Tahun 2024; (ii) Tersedianya dokumen usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak; (iii) Penyusunan laporan BMN secara tepat waktu;

Capaian IK Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%) sebagai berikut :

Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) sebagai berikut :

Tabel 44. Capaian IK 19 Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%)

IK 19. Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%)										
Realisasi Tahunan				2024					Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW IV	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	% Kenaikan Capaian 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	-	100	77,80	77,80	100	120.00	-	77,80	120
Persentase Capaian Tahunan				Persentase Capaian				Kenaikan/penurunan Capaian Tahun 2023-2024	Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
-	-	-	120	100	120		-	100	120.00	

Capaian IK pada tahun 2024 sudah mencapai target yang telah ditetapkan bahkan lebih dimana dengan target 77,80 dan capaian sebesar 100% atau sama dengan 120%, Capaian sesuai dengan memo penanggungjawab IK Nomor: 7 /BBRSEKP/TU.210/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tertang Penyampaian Hasil Capaian IK Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%), capaian IK juga dapat diakses melalui tautan tautan https://bit.ly/DadukIK_PengelolaanBMN2024

Indikator ini, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka capaian IK tidak ada peningkatan maupun penurunan capaian atau sama saja namun, untuk IK ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja kinerja 5 tahunan karena IK ini baru di bentuk di tahun 2023 untuk mengakomodir kegiatan untuk mengakomodir kegiatan pada BBRSEKP terkait Pemeliharaan kantor dan Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor pada BBRSEKP di tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan satker sejenis di Lingkungan BPPSDMKP, antara BBRSEKP dengan BBRP2BKP untuk IK ini tidak dapat dibandingkan karena keberadaan IK untuk mengakomodir Fungsional di BBRSEKP.

Keberhasilan atas pencapaian IK ini antara lain adanya mengIKti Bimtek pengelolaan BMN, identifikasi properti onvestasi BMN, tersedianya dokumen kebutuhan BMN tahun 2024, tersedianya dokumen usulan penghapusan BMN serta adanya laporan semesteran BMN di BBRSEKP .

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara penyusunan laporan terkait BMN, Rapat internal terkait pengelolaan BMN di BBRSEKP serta berkoordinasi dengan Set. BRSDMKP terkait dengan penghapusan BMN.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Pemeliharaan kantor dan Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor” dengan pagu anggaran sebesar Rp883.821.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp881.967.229 jika dibandingkan dengan persentase capaian sesuai kinerja IK sebesar 120% maka terdapat efiseinsi sebesar 20.21 atau sama dengan kegiatan berjalan cukup efisien.



Ket : Rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan triwulan III T. A 2024 Ket : Perawatan rutin BMN BBRSEKP

Gambar 26. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 19

Indikator Kinerja 20.

Layanan Perkantoran BBRSEKP (%)

IK Layanan Perkantoran BBRSEKP (%) merupakan tersusunnya laporan layanan perkantoran di BBRSEKP meliputi dokumen Rencana Operasional Kegiatan dan Laporan Layanan Perkantoran diantaranya (i) Dokumen Laporan Layanan Perkantoran; (ii) Dokumen Laporan Layanan Hubungan Masyarakat; (iii) Dokumen Laporan Layanan Umum; (iv) Dokumen Laporan Layanan Data Dan Informasi; (v) Dokumen Laporan Layanan Manajemen SDM; (vi) Dokumen Laporan Layanan Perencanaan Dan Penganggaran; (vii) Dokumen Laporan Monitoring Dan Evaluasi; (viii) Dokumen Laporan Manajemen Keuangan

Capaian IK Layanan Perkantoran BBRSEKP (%) sebagai berikut :

Tabel 45. Capaian IK 20 Persentase Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

IK-20. Persentase Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											
Realisasi Tahunan				2024					Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)		
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW IV	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024	
-	-	100.00	100.00	100	100	100	100.00	100.00	100	100.00	
Persentase Capaian Tahunan				Persentase Capaian				Kenaikan/Penurunan Capaian Tahun 2023-2024	Reviu Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)		
-	-	100.00	100.00	100	100		-	100	100		

Capaian IK Layanan Perkantoran BBRSEKP (%) pada tahun 2024 mencapai 100 dari target 100 atau sama dengan 100%. Capaian ini sesuai dengan surat penanggungjawab IK nomor: B.2950/BBRSEKP/TU.210/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024, data dukung capaian IK juga dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/DadukIK_LayananPerkantoran2024

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya untuk IK ini tidak mengalami peningkatan maupun penurunan capaian atau sama dengan stabil, jika dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan untuk IK ini tidak dapat dibandingkan karena IK baru dibentuk di tahun 2022, jika dibandingkan dengan target jangka menengah Reviu Renstra capaian sudah mencapai target sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan satker sejenis di BPPSDMKP lainnya, antara BBRSEKP dengan BBRP2BKP, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 46. Perbandingan Capaian IK 20 dengan satker BBRP2BKP

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)			
Satker	Target	Realisasi	Persentase
BBRSEKP	100	100	100%
BBRP2BKP	100	100	100

Keberhasilan atas pencapaian IK ini antara lain adanya pengawalan kegiatan secara intensif atas pelaksanaan kegiatan di BBRSEKP, terjalin komunikasi yang baik antar koordinator di BBRSEKP serta rutin dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk mengawal pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara penyusunan laporan periodik (triwulana), Rapat internal pembahasan kegiatan dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Kebutuhan sehari-hari perkantoran” dengan pagu anggaran sebesar Rp1.299.539.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.299.100.849 jika dibandingkan dengan persentase capaian sesuai kinerja IK sebesar 100% maka terdapat efiseinsi sebesar 0,03 atau sama dengan kegiatan berjalan efisien.



Ket : Rapat Monitoring dan Evaluasi Tahun 2024



Ket : Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Lingkup BPPSDMKP Tahun 2024

Gambar 27. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 20

3.3 Realisasi Keuangan BBRSEKP Tahun 2024

Penyerapan Pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan secara umum berhasil mencapai sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan baik. Anggaran BBRSEKP pada tahun 2024 disusun berdasarkan variable jenis pengeluaran dan variable kegiatan. Variabe pengeluaran yaitu belanja pegawai dan belanja barang. Sedangkan variable kegiatan adalah kegiatan dukungan manajemen.

Pagu anggaran BBRSEKP dalam DIPA TA. 2024 adalah Rp12.235.000.000 yang terdiri dari (1) Belanja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp7.135.000.000 dan Belanja Barang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.100.000.000,- dengan realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp10.979.114.949 atau sama dengan 89,73%, namun dengan adanya blokir anggaran senilai Rp1.232.800.000 maka persentase realisasi anggaran menjadi 99,86%.

Tabel 47. Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Tahun 2024

JENIS BELAJA	PAGU (Rp)	PAGU SETELAH BLOKIR (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	Rp7.135.000.000	Rp7.135.000.000	Rp7.133.211.739	99,97%
Belanja Barang	Rp5.100.000.000	Rp3.867.200.000	Rp3.854.034.560	99,66%
TOTAL	Rp12.235.000.000	Rp11.002.200.000	Rp10.987.246.299	99,86%

Sumber : Aplikasi Omspan

Tabel 48. Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan BBRSEKP	779.440.000	777.573.069	99,76
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	10.242.267.000	10.225.583.783	99,84

Sumber : Aplikasi Omspan

Tabel 49. Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran per IK Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan BBRSEKP	1 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria BBRSEKP (NSPK)	779.440.000	777.573.069	99,76
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	2 Indeks Profesional ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks)	75.480.000	72.851.539	96,52
		3 Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%)	54.520.000	52.855.200	96,52
		4 Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%)	182.777.000	181.550.494	99,33
		5 Persentase Efektifitas penyebaran	4.447.000	4.436.153	99,76

			infromasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%)			
		6	Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket)	79.535.000	78.958.503	99,28
		7	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%)	39.673.000	39.643.900	99,93
		8	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP	12.600.000	12.600.000	100
		9	Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP	12.202.000	12.156.400	99,63
		10	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	75.163.000	75.156.400	99,63
		11	Nilai Kinerja Anggaran	137.937.000	137.104.238	99,40
		12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai)	Rp.63.800,-	Rp.43.432,-	68,08 %
		13	Nilai PM SAKIP BBRSEKP (Nilai)	29.024.000	29.009.637	99,95
		14	Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)	7.135.000.000	7.133.212.555	99,97
		15	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK BBRSEKP Dibandingkan Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)	10.530.000	10.530.000	100
		16	Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-reakreditasi (Indeks Jurnal)	92.467.000	91.839.550	99,32
		17	Persentase Rekomendasi Hasil	10.690.000	10.690.000	100

			Pengawasan BBRSEKP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)			
	18	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai)		48.246.000	44.660.100	92,57
	19	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%)		883.821.000	881.967.229	99,79
	20	Layanan Perkantoran BBRSEKP (%)		1.299.539.000	1.299.100.849	99,97
Total Realisasi Anggaran Tahun 2024				11.002.200.000	10.987.246.299	99,86

Sumber : Aplikasi Omspan

Gambar 21 : Sebaran Realisasi BBRSEKP berdasarkan Variabel Pelaksanaan, Realisasi dan Pemanfaatan

Dashboard



Sumber : Aplikasi e-Monev Bappenas

Realisasi anggaran berdasarkan output dapat dilihat pada gambar 27. Output dari kegiatan utama BBRSEKP yaitu kegiatan layanan dukungan manajemen serta kegiatan prioritas direalisasikan sebesar 99,86% atau senilai Rp10.987.246.299 yang mencakup:

- 1) Analisis Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Kegiatan Blokir AA)
- 2) Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar)
- 3) Layanan Dukungan Manajemen Internal

3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BBRSEKP

A. Efisiensi Anggaran

BBRSEKP sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (*berhasil guna*) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan Diktum 14 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran mengamanatkan pelaksanaan *assessment RO*, yaitu: *“Dalam rangka meningkatkan kualitas data capaian kinerja yang dilaporkan melalui sistem informasi, dilakukan pengisian informasi pra-pelaporan”*

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (*output*) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (*output*) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran *output* kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.

Secara ringkas dapat disimpulkan sebagaimana pada tabel 42 berikut, efisiensi anggaran BBRSEKP memperoleh skor 15,75%. Efisiensi menunjukkan perolehan positif dari rentang nilai efisiensi +20 sampai dengan -20. Kondisi ini dipengaruhi atas penggunaan anggaran dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.987.246.299. (99,86%) dari total pagu Rp11.002.200.000 dengan capaian tingkat *output* kegiatan sebesar 115,61% sebagaimana rumus perhitungan berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Pencapaian nilai efisiensi sebesar 15,75% menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada BBRSEKP di tahun 2024 dinilai cukup efisien dan kegiatan telah berjalan dengan cukup

baik, namun kondisi ini perlu mendapat perhatian dan pengawalan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Tabel 50. Capaian Efisiensi Anggaran BBRSEKP Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target IK	Capaian IK	% Capaian	Kegiatan Pendukung RKAKL	% RVRO	Pagu (Rp)	Realisasi (000)	%	Efisiensi
1	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan BBRSEKP									
1	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria BBRSEKP (NSPK)	3	4	120	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	100	779.440.000	777.573.069	99,76	20.24
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker									
2	Indeks Profesional ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks)	76	89,46	117,71	Layanan Perencanaan SDM Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (WA.2378.EBC.954.501.A)	100	75.480.000	72.851.539	96.52%	21.19
3	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%)	85	97,40	114,59	Layanan Pengembangan SDM Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (WA.2378.EBC.954.501.B)	100	54.520.000	52.855.200	96.95%	17.64
4	Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%)	100	121	120	Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (WA.2378.EBA.962.501.OA)	100	182.777.000	181.550.494	99.33%	20.67
5	Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%)	90,50	123,50	120	Pengelolaan Konten Publikasi Media Sosial (WA.2378.EBA.958.501.OC)	100	4.447.000	4.436.153	99.76%	20.24
6	Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket)	3	3	100	Pelayanan Kehumasan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (WA.2378.EBA.958.501.OA)	100	79.535.000	78.958.503	99.28%	0.72
7	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%)	94	133,33	120	Layanan Data dan Sistem Informasi Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (WA.2378.EBA.963.502.OA)	100	39.673.000	39.643.900	99.93%	20.07
8	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP	1	1	100	Langganan daya dan jasa (WA.2378.EBA.994.002.MB)	100	12.600.000	12.600.000	100.00%	0.00
9	Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP	86,50	92,00	106,36	Pelayanan Kerja Sama Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (WA.2378.EBA.958.501.OB)	100	12.202.000	12.156.400	99.63%	6.73

10	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	93,76	99,29	105,90	Pelayanan Keuangan dan Perbendaharaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (WA.2378.EBD.955.501.OA)	100	75.163.000	75.156.400	99.95%	5.95
11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP	71	100	120	Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (WA.2378.EBD.952.501)	100	137.937.000	137.104.238	99.40%	20.60
12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai)	94	98,53	104,82	Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (WA.2378.EBD.953.501.OA)	100	58.616.000	57.292.491	97.74%	7,08
13	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	81	83,65	103,27	Penyusunan Pelaporan Kinerja Satker (WA.2378.EBD.953.501.OB)	100	29.024.000	29.009.637	99.95%	3.32
14	Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)	98	99,86	101,90	Gaji dan Tunjangan (WA.2378.EBA.994.001.MA)	100	7.135.000.000	7.133.212.555	99.97%	1.93
15	Batas Tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BBRSEKP (%)	≤ 0,50	0,10	120	Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (WA.2378.EBD.955.501.OC)	100	10.530.000	10.530.000	100.00%	20.00
16	Jurnal Sosial Ekonomi yang Terakreditasi (Indeks Jurnal)	1	1	100	Pelayanan Data Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (WA.EBA.963.501)	100	92.467.000	91.839.550	99.32%	0.68
17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	82	100	120	Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (WA.2378.EBD.955.501.OB)	100	10.690.000	10.690.000	100.00%	20.00
18	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai)	85	95,40	112,24	Pelayanan Kepatuhan Birokrasi Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (WA.2378.EBA.962.501.OB)	100	48.246.000	44.660.100	92.57%	19.67
19	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%)	77,80	100	120	1. Pemeliharaan kantor 2. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor	100	883.821.000	881.967.229	99.79%	20.21

						(WA.2378.EBA.994.002.MC dan MD)					
	20	Layanan Perkantoran BBRSEKP (%)	100	100	100	Kebutuhan sehari-hari perkantoran (WA.2378.EBA.994.002.MA)	100	1.299.539.000	1.299.100.849	99.97%	0.03
Total Anggaran dan Efisiensi BBRSEKP Tahun 2024					115,61		100	10.987.246.299		99,86	15,75

Sumber Data : Aplikasi Omspans



BAB 4

Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Permasalahan Dan Rekomendasi

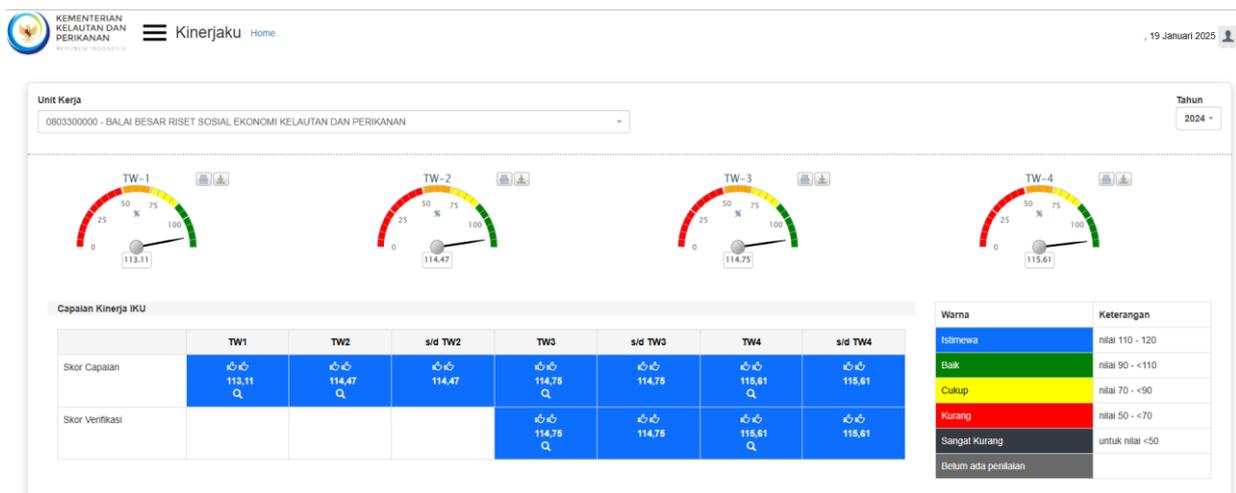


BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Pengukuran capaian kinerja BBRSEKP tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing – masing Sasaran Kegiatan (SK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balance scorecard* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://Kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BBRSEKP di tingkat satker tahun 2024 sebesar **115,61%**, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Sumber : Dashboard Aplikasi Kinerjaku

Selama tahun 2024 dari 20 IK BBRSEKP, terdapat 11 IK berstatus istimewa (biru), dan terdapat 9 IK berstatus baik (hijau). Rincian target dan realisasi 20 IK tersebut adalah:

1. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria BBRSEKP (NSPK) dengan target sebesar 3 NSPK dengan capaian sebesar 4 NSPK atau sama dengan 120%;
2. Indeks Profesional ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks) dengan target indeks 76 dan capaian indeks sebesar 89,46 atau sama dengan 117,71%;
3. Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP(%) dengan target sebesar 85% dan capaian sebesar 97,40% atau sama dengan 114,59%;
4. Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%) dengan target sebesar 100% dan capaian sebesar 121% atau sama dengan 120%;
5. Persentase Efektifitas penyebaran informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP(%) dengan target sebesar 90,50 dan capaian sebesar 123,50% atau sama dengan 120%;

6. Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket) dengan target sebanyak 3 paket dan capaian sebanyak 3 paket kerjasama atau sama dengan 100%;
7. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%) dengan target sebesar 94,00% dan capaian sebesar 133,33% atau sama dengan 120%;
8. Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP (Inovasi) dengan target sebanyak 1 inovasi dan capaian sebanyak 1 inovasi atau sama dengan 100%;
9. Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai) dengan target senilai 86,50 dan capaian senilai 92,00 atau sama dengan 106,36%;
10. Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai) dengan target senilai 93,76 dan capaian senilai 99,29 atau sama dengan 105,90%;
11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP dengan target senilai 71 dan capaian senilai 100 atau sama dengan 120%;
12. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai) dengan target senilai 94 dan capaian senilai 98,53 atau sama dengan 104,82%;
13. Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai) dengan target senilai 81 dan capaian senilai 83,65 atau sama dengan 103,27%;
14. Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%) dengan target sebesar 98% dan capaian sebesar 99,86% atau sama dengan 101,90%;
15. Batas Tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BBRSEKP (%) dengan target sebesar 0,50% dan capaian sebesar 0,10% atau sama dengan 120%;
16. Jumlah Sosial Ekonomi yang Ter-reakreditasi (Indeks Jumlah) dengan target sebanyak 1 indeks dan capaian sebesar 1 indeks jurnal atau sama dengan 100%;
17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) dengan target sebesar 82% dan capaian sebesar 100% atau sama dengan 120%;
18. Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai) dengan target senilai 85 dan capaian senilai 95,40 atau sama dengan 120%;
19. Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%) dengan target sebesar 77,80% dan capaian sebesar 100% atau sama dengan 120%;
20. Layanan Perkantoran BBRSEKP (%) dengan target sebesar 100% dan capaian sebesar 100% atau sama dengan 100%.

Tabel 51. Rincian Target Dan Realisasi Atas 20 IK Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian 2024	% Capaian
1	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan BBRSEKP	1 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria BBRSEKP (NSPK)	3	4	120
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	2 Indeks Profesional ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks)	76	89,46	117,71
		3 Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%)	85	97,40	114,59
		4 Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%)	100	121	120
		5 Persentase Efektifitas penyebaran informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%)	90,50	123,50	120
		6 Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket)	3	3	100
		7 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%)	94,00	133,33	120
		8 Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP (Inovasi)	1	1	100
		9 Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai)	86,50	92,00	106,36
		10 Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	93,76	99,29	105,90
		11 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	71	100	120
		12 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai)	94	98,53	104,82
		13 Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	81	83,65	103,27
		14 Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)	98,00	99,86	101,90
		15 Batas Tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BBRSEKP (%)	≤0,5	0,10	120
		16 Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-reakreditasi (Indeks Jurnal)	1	1	100
		17 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	82	100	120
		18 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang Lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai)	85	95,40	112,24
		19 Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%)	77,80	100	120
		20 Layanan Perkantoran BBRSEKP (%)	100	100	100

4.2 Permasalahan Dan Rekomendasi

Secara umum, pencapaian kinerja BBRSEKP adalah istimewa. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yang dapat tercapai semuanya, bahkan beberapa melebihi target yang ditetapkan serta realisasi anggaran yang tinggi.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran BBRSEKP selama tahun 2024 sebesar Rp.10.987.246.299 dari pagu anggaran Rp. 11.002.200.000. Dengan demikian, pencapaian kinerja output BBRSEKP dapat tercapai dengan dukungan anggaran sebesar 99,86% dari pagu.

Jika dilihat berdasarkan Sasaran Kegiatan (SK), maka dari dua SK tercapai melebihi target atau **“ISTIMEWA”**, yaitu baik SK “Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan BBRSEKP” dengan persentase capaian 120% dan “Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker” dengan persentase capaian 111,21%.

Guna mewujudkan peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintah dan badan publik membutuhkan reformasi sistem dan pola kerja utama dengan menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau *e-government*. Pelaksanaan *e-government* terkait keterbukaan informasi dilakukan dengan sistem *one data policy* atau kebijakan satu data agar dapat diakses oleh sistem kementerian dan lembaga sehingga dibutuhkan indikator keterbukaan informasi.

2. Verifikasi Capaian Kinerja

Dalam rangka akuntabilitas atas capaian IK, kegiatan verifikasi perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuai bukti dukung yang ada. Disamping itu, verifikasi penting dilaksanakan agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat dilakukan secara disiplin dan tepat waktu.

LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. Rita Tisiana Dwi K**
Jabatan : Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Desember 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Riset Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan

A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

Lembar Pengesahan	
Sekretaris BRSDMKP	
Ketua Tim Kerja BBRSEKP	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kegiatan	1	Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Rekomenjak)	8
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	2	Indeks Profesional ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks)	80
		3	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%)	85
		4	Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%)	100
		5	Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%)	90,5
		6	Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket)	3
		7	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%)	94
		8	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP (Inovasi)	1
		9	Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai)	88
		10	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	93,76
		11	Nilai Kinerja Anggaran BBRSEKP (Nilai)	82
		12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai)	94
		13	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	81
		14	Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)	98
		15	Batas Tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BBRSEKP (%)	≤ 0,5
		16	Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-reakreditasi (Indeks Jurnal)	1
		17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	82
		18	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai)	85

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	19 Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%)	77,8
	20 Layanan Perkantoran BBRSEKP (%)	100

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Analisis Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*	1.000.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	11.300.000.000
Total Anggaran Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan		12.300.000.000

Catatan:

*Blokir

Jakarta, 27 Desember 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Riset Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan

A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

Lembar Pengesahan	
Sekretaris BRSDMKP	
Ketua Tim Kerja BBRSEKP	f.

Perjanjian Kinerja (Rev 1)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI
KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH I KOMPLEKS BINA SAMUDERA GEDUNG BPPSDM II LANTAI 2
ANCOL TIMUR JAKARTA UTARA 14430
TELEPON (021) 64711538 (LACAK). FAKSIMILE (021) 64700924
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sosek@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. Rita Tisiana Dwi K**
Jabatan : Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Oktober 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Riset Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan

A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kegiatan	1	Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Rekomenjak)	8
2	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan BBRSEKP	2	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria BBRSEKP (NSPK)	2
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	3	Indeks Profesional ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks)	76
		4	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%)	85
		5	Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%)	100
		6	Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%)	90,5
		7	Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket)	3
		8	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%)	94
		9	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP (Inovasi)	1
		10	Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai)	86,5
		11	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	93,76
		12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	71
		13	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai)	94
		14	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	81
		15	Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)	98
		16	Batas Tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BBRSEKP (%)	≤ 0,5
		17	Jurnal Sosial Ekonomi yang Terakreditasi (Indeks Jurnal)	1

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	18 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	82
	19 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai)	85
	20 Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%)	77,8
	21 Layanan Perkantoran BBRSEKP (%)	100

Data Anggaran

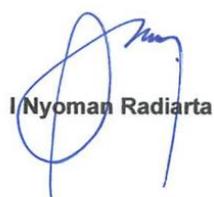
NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Analisis Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*	1.000.000.000
2.	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	800.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	11.300.000.000
Total Anggaran Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan		13.100.000.000

Catatan:

*Blokir

Jakarta, 04 Oktober 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Riset Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan



A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

Perjanjian Kinerja (Rev 2)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN PASIR PUTIH I KOMPLEKS BINA SAMUDERA GEDUNG BPPSDM II LANTAI 2
ANCOL TIMUR JAKARTA UTARA 14430
TELEPON (021) 64711538 (LACAK). FAKSIMILE (021)64700924
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sosek@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. Rita Tisiana Dwi K**
Jabatan : Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 November 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Riset Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta


A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

Lembar Pengesahan	
Sekretaris BPPSDMKP	
Plt. Ka. Subbag Umum	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kegiatan	1	Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Rekomenjak)	8
2	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan BBRSEKP	2	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria BBRSEKP (NSPK)	2
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	3	Indeks Profesional ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks)	76
		4	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%)	85
		5	Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%)	100
		6	Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%)	90,5
		7	Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket)	3
		8	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%)	94
		9	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP (Inovasi)	1
		10	Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai)	86.5
		11	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	93,76
		12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	71
		13	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai)	94
		14	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	81
		15	Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)	98
		16	Batas Tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BBRSEKP (%)	≤ 0,5
		17	Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-reakreditasi (Indeks Jurnal)	1

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	18 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	82
	19 Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai)	85
	20 Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%)	77,8
	21 Layanan Perkantoran BBRSEKP (%)	100

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Analisis Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*	1.000.000.000
2.	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	800.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	10.435.000.000
Total Anggaran Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan		12.235.000.000

Catatan:

*Blokir

Jakarta, 18 November 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Riset Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan

A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

Lembar Pengesahan	
Sekretaris BPPSDMKP	
Plt. Ka. Subbag Umum	

Penghargaan





Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
2024